



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 - 2026

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I	: PENDAHULUAN	1
1.1	: Latar Belakang	1
1.2	: Landasan Hukum	3
1.3	: Maksud dan Tujuan	7
1.4	: Sistematika Penulisan	8
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA	10
2.1	: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	10
2.2	: Uraian Tugas	12
2.3	: Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	23
2.4	: Sarana dan Prasarana	25
2.5	: Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	28
2.6	: Kinerja Pelayanan Sektor Pendapatan Dan Pembiayaan Pembangunan	39
2.7	: Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	79
2.7.1	: Tantangan	79
2.7.2	: Peluang	80
2.7.3	: Kekuatan (<i>Strength</i>)	81
2.7.4	: Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	81
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA	81
3.1	: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	81
3.2	: Telaahan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Daerah	83
3.3	: Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Renstra Provinsi Jawa Barat	92
3.3.1	: Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	92
3.3.2	: Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	96
3.4	: Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	98
3.4.1	: Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	98
3.4.2	: Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	106
3.5	: Penentuan Isu-isu Strategis	109

BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN	111
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	115
5.1	: Strategi	115
5.2	: Arah Kebijakan	115
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	120
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	139
7.1	: Kerangka Logis Pencapaian Tujuan dan Sasaran	139
7.2	: Pemetaan Kerangka Logis Renstra Perubahan	140
BAB VIII	: PENUTUP	145

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Formal	24
Tabel 2.2	:	Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian	24
Tabel 2.3	:	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan	24
Tabel 2.4	:	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural	24
Tabel 2.5	:	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional	25
Tabel 2.6	:	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal	25
Tabel 2.7	:	Daftar Peralatan Gedung Kantor	26
Tabel 2.8	:	Daftar Perlengkapan Gedung Kantor	27
Tabel 2.9	:	Daftar Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	27
Tabel 2.10	:	Daftar Meubelair	28
Tabel 2.11	:	Pembangunanm Urusan Perhubungan Dari Tahun 2018-2021	29
Tabel 2.12	:	Kondisi Rambu-Rambu Lalu Lintas	29
Tabel 2.13	:	Marka Jalan Menurut Kondisinya	30
Tabel 2.14	:	Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kondisinya	31
Tabel2.15	:	Fasilitas Penyebrangan (Zebra Cross) Menurut Kondisinya	31
Tabel 2.16	:	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menurut Kondisinya	32
Tabel 2.17	:	Guard Rail (Pagar Pengaman) Menurut Kondisinya	32
Tabel 2.18	:	Cermin Tikungan Menurut Kondisinya	33
Tabel 2.19	:	Pita Penggaduh Menurut Kondisinya	33
Tabel 2.20	:	Ruang Parkir Pada Badan Jalan	34
Tabel 2.21	:	Terminal Angkutan Penumpang	34
Tabel 2.22	:	Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji	37
Tabel 2.23	:	Data Trayek Angkutan Kota	37
Tabel 2.24	:	Capaian Kinerja Pendapatan Periode Renstra Tahun 2017-2022	39
Tabel 2.25	:	Capaian Kinerja Pendapatan Tahunan Per Objek Pendapatan Periode Renstra Tahun 2017-2022	42
Tabel 2.26	:	Capaian Kinerja Keuangan Pembiayaan Pembangunan Periode Renstra Tahun 2017-2022	43
Tabel 2.27	:	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Periode Renstra Tahun 2017-2022	45
Tabel 2.28	:	Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021	66
Tabel 2.29	:	Daftar Ruas Jalan Yang Memenuhi Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2021	67

Tabel 2.30	:	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum	76
Tabel 3.1	:	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84
Tabel 3.2	:	Arah Kebijakan Dari Strategi Pembangunan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026	85
Tabel 3.3	:	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Terhadap Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Program Daerah	92
Tabel 3.4	:	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Terkait Perubahan Isu Strategis Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2019-2024	94
Tabel 3.5	:	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	98
Tabel 3.6	:	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	104
Tabel 3.7	:	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	108
Tabel 3.8	:	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Terkait Isu Strategis Sasaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS-Perubahan) Kota Tasikmalaya	107
Tabel 4.1	:	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026	113
Tabel 5.1	:	Identifikasi Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Terhadap Tujuan, Sasaran dan Program Daerah	117
Tabel 5.2	:	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026	118
Tabel 6.1	:	Identifikasi Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Terhadap Tujuan, Sasaran dan Program Daerah	121

Tabel 6.2	:	Identifikasi Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	124
Tabel 6.3	:	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026	134
Tabel 6.4	:	Pendanaan Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2022	138
Tabel 7.1	:	Indikator Kinerja Tujuan Urusan Perhubungan Tahun 2023-2026	140
Tabel 7.2	:	Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perhubungan Tahun 2023-2026	141
Tabel 7.3	:	Indikator Kinerja Sasaran Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023-2026	141
Tabel 7.4	:	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	142
Tabel 7.5	:	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	:	Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026	2
Gambar 2	:	Flowchat Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	3
Gambar 3	:	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	12
Gambar 4	:	Identifikasi Faktir Internal dan Eksternal Berdasarkan Analisis SWOT	81
Gambar 5	:	Kerangka Logis Renstra Pencapaian Sasaran “Meningkatkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan”	139
Gambar 6	:	Pemetaan Kerangka Logis Renstra Pencapaian Sasaran “Meningkatkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan”	140

BAB I

PENDAHULUAN

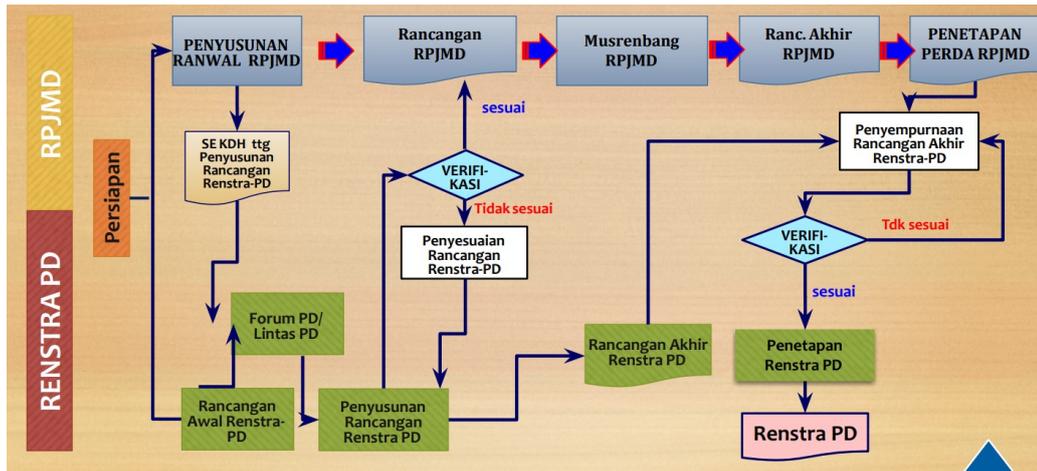
1.1 Latar Belakang

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk periode 2023-2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Mengingat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Wali Kota Tasikmalaya No : 050/0497/Bapelitbangda tanggal 11 Januari 2022 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, maka setiap perangkat daerah di Kota Tasikmalaya wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Konsekuensi logis masa renstra berusia 4 (empat) tahun.

Pada masa berakhirnya renstra 2017-2022 terdapat beberapa perubahan yang bersifat mendasar antara lain adanya perubahan kebijakan perencanaan nasional, perubahan kebijakan di tingkat propinsi, perubahan-perubahan KLHS, RTRW, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya, serta adanya pandemi Covid-19, perlu sinergitas perencanaan agar renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya sejalan dengan dinamika yang terjadi.

Keterkaitan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2023 – 2026, digambarkan sebagai berikut :



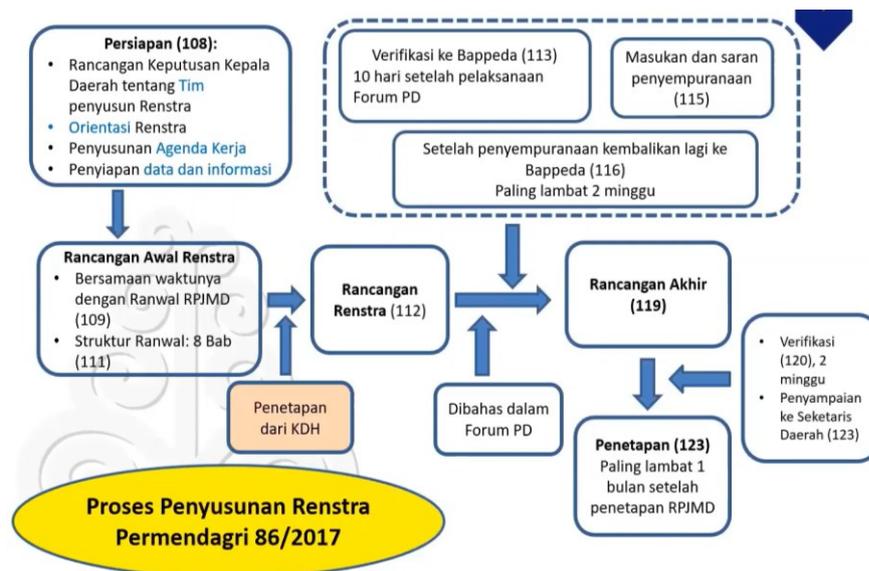
Gambar 1
Keterkaitan Rencana RPJMD/ Pembangunan Daerah (RPD) dengan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026

Proses penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Penyusunan renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dengan memperhatikan adanya perubahan - perubahan di tingkat nasional, propinsi dan kota sebagaimana tersebut di atas.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk tahun 2023-2026. Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya pada tahun 2023-2026.

Berikut flowchat tahapan penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya :



Gambar 2
Flowchat Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
 26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan;
 27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2025;
 31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031;
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Tasikmalaya;
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
40. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
41. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
42. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
43. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Jasa Terminal;
44. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek;

45. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;
46. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
47. Surat Edaran Wali Kota Nomor : 050/265/Bappelitbanda tentang Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah merupakan dokumen Rencana Strategis guna menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu Tahun 2023–2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan kebijakan dan/atau dinamika yang terjadi dan mensinergikan tujuan dan sasaran urusan perhubungan ditingkat nasional dan pemerintah propinsi yang terjadi pada masa rencana 2023-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.
- 4) Mensinergikan antara perencanaan pembangunan bidang perhubungan Kota Tasikmalaya dengan pembangunan urusan perhubungan di tingkat nasional dan provinsi terkait terdapatnya perubahan kebijakan, tujuan dan sasaran urusan perhubungan dan/atau dinamika yang terjadi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, sumber daya Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra

Kementerian Perhubungan R.I, telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dan rencana tindak lanjut

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah organisasi tipe B, dengan tugas pokok adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dengan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - 1. Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha Angkutan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. UPTD.

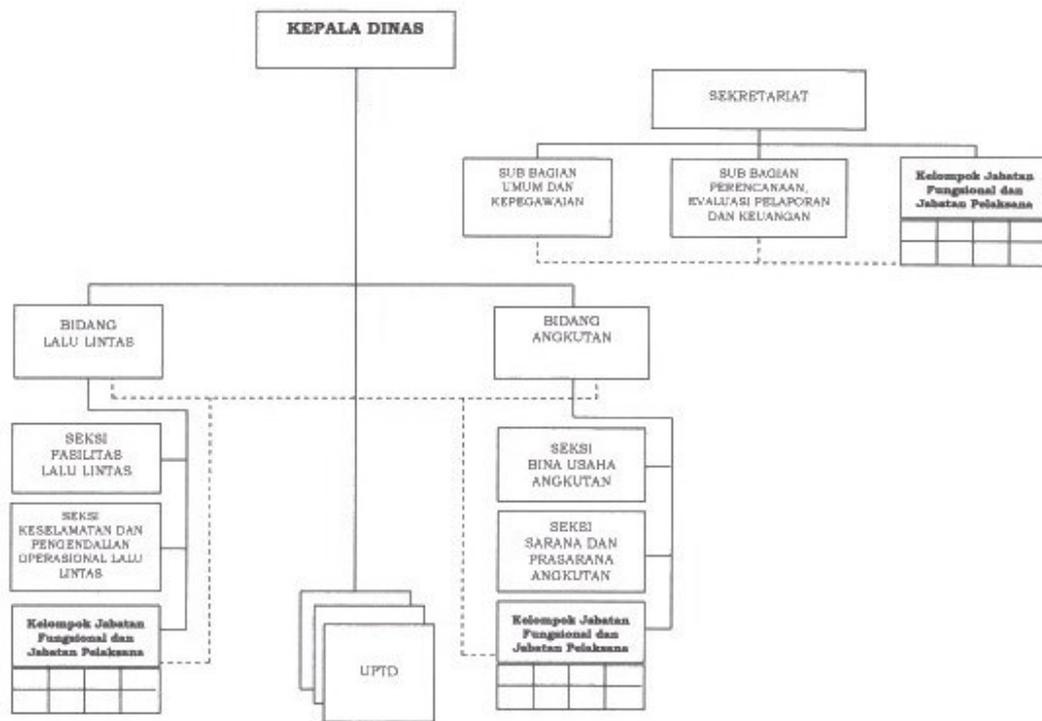
Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terdiri dari :

1. UPTD Pengelolaan Parkir;
2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. UPTD Pengelolaan Terminal.

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Operasional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdapat kelompok jabatan fungsional lain selain yang telah disebutkan di atas, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang berada di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.



Gambar 3
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

2.2 Uraian Tugas

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tugas pokok dan rincian tugas

Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

3. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Dinas dalam pengelolaan urusan perhubungan.

Rincian Tugas Kepala Dinas, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan lalu lintas;
- d. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang angkutan jalan;
- e. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit organisasi dinas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang perhubungan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum

Rincian tugas Sekretariat, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan serta penganggaran Dinas;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas;
- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas;
- g. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- h. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;

- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- 2.a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkup Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan, sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
- b. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja dinas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan data dan statistik berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk bahan perencanaan, pelaksanaan tugas dan pelaporan;
- g. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
- h. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;

- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan dalam manajemen lalu lintas, pengelolaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan serta pembinaan keselamatan lalu lintas dan pengendalian operasional lalu lintas.

Rincian tugas Bidang Lalu Lintas :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Lalu Lintas;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah;
- d. menyelenggarakan pengkajian kebutuhan dan pengembangan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- e. mengoordinasikan penyediaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- f. menyelenggarakan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota dan jalan provinsi serta jalan negara yang berada di wilayah kota;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan audit serta inspeksi keselamatan serta lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah kota;
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang lalu lintas;
- i. menyelenggarakan penyiapan bahan kebijakan pengelolaan parkir;
- j. menyelenggarakan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;

- k. menyelenggarakan penyiapan bahan perijinan atau rekomendasi di bidang lalu lintas;
- l. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lalu lintas;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Lalu Lintas;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas membawahkan :

- a. Seksi Fasilitas Lalu Lintas; dan
 - b. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas.
- 3.a Seksi Fasilitas Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan.

Rincian tugas Seksi Fasilitas Lalu Lintas, sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
- b. melaksanakan inventarisasi dan perencanaan kebutuhan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- c. melaksanakan penyediaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap kondisi fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- e. melaksanakan pengelolaan *data base* fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;
- f. melaksanakan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan;

- g. melaksanakan pengembangan sistem informasi fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan yang terintegrasi dengan sistem informasi Dinas;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Fasilitas Lalu Lintas;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3.a. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap keselamatan dan operasional lalu lintas serta angkutan jalan.
- Rincian tugas Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas, sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, penertiban dan pengendalian lalu lintas di jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara yang berada di wilayah kota;
 - c. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. melaksanakan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan pengelolaan data kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana operasional penertiban lalu lintas;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas;

- h. melaksanakan pengembangan sistem informasi keselamatan dan pengendalian operasional lalu lintas yang terintegrasi dengan sistem informasi Dinas;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan manajemen angkutan, bina usaha angkutan serta prasarana dan sarana angkutan.

Rincian tugas Bidang Angkutan, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Angkutan;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang angkutan;
- c. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan daerah;
- d. menyelenggarakan pengkajian kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana angkutan;
- e. menyelenggarakan penyiapan bahan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian terminal penumpang dan terminal barang;
- f. menyelenggarakan pembinaan manajemen angkutan untuk jaringan trayek dan jaringan lintas;
- g. menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan tarif angkutan;
- h. menyelenggarakan penyusunan bahan pedoman pengujian kendaraan bermotor;

- i. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomendasi/ perijinan angkutan;
- j. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian angkutan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Angkutan;
- l. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan, membawahkan :

- a. Seksi Bina Usaha Angkutan; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan.
- 4.a. Seksi Bina Usaha Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam pembinaan usaha angkutan.

Rincian tugas Seksi Bina Usaha Angkutan, sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Bina Usaha Angkutan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan konsep pengaturan perusahaan angkutan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan terhadap pengusaha angkutan dan pengemudi/awak angkutan umum;
- d. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi /perijinan angkutan;
- e. melaksanakan pengelolaan *data base* perijinan angkutan;
- f. melaksanakan pengembangan sistem informasi perijinan angkutan yang terintegrasi dengan sistem informasi dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan tarif angkutan;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan;

- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Usaha Angkutan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4.b. Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyediaan dan operasional prasarana dan sarana angkutan.

Rincian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan;
- b. melaksanakan inventarisasi dan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana angkutan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penetapan, pengembangan, pengelolaan dan pengaturan terminal penumpang dan terminal barang
- d. melaksanakan proses penyediaan sarana dan prasarana angkutan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengelolaan prasarana dan fasilitas penunjang terminal penumpang dan terminal barang serta tempat-tempat pemberhentian penumpang (*Halte/Shelter*);
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana teknis angkutan;
- h. melaksanakan pengelolaan *data base* prasarana dan sarana angkutan;

- i. melaksanakan pengembangan sistem informasi prasarana dan sarana angkutan yang terintegrasi dengan dengan sistem informasi dinas;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

2.3 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Setiap organisasi tidak terlepas dari unsur manusia sebagai pelaksananya. Pentingnya arti sumber daya manusia adalah mengingat pada bidang tugas yang akan dilaksanakannya. Prinsip *the right man on the right job* sangat diperlukan untuk menciptakan kehandalan dan profesionalisme pegawai. Kualitas sumber daya manusia terkait erat dengan tingkat pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan formal ditempuh melalui pendidikan sekolah-sekolah, sedangkan non formal ditempuh melalui pendidikan penjenjangan dan kursus-kursus / diklat teknis bidang Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 87 PNS, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah Pegawai (Orang)
1	S-3	-	-	-
2	S-2	6	-	6
3	S-1/D.IV	25	5	30
4	DIII/Akademi	2	-	2
5	DII	4	3	7
6	DI	-	-	-
7	SLTA dan lebih rendah	41	1	42
Jumlah		78	9	87

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tahun 2021, diolah

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	L	P	Jumlah Pegawai
1	PNS	79	8	87
2	Tenaga Kontrak Kerja	-	-	-
Jumlah		79	8	87

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tahun 2021, diolah

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	3	-	3
2	Golongan III	35	5	40
3	Golongan II	40	4	44
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		78	9	87

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tahun 2021, diolah

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	L	P	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	2	0	2
3	Eselon IV	13	1	14
Jumlah		16	1	17

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tahun 2021, diolah

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	L	P	Jumlah Pegawai
1	PKB Penyelia	5	-	5
2	PKB Pelaksana Lanjutan	0	-	0
3	PKB Pelaksana	3	3	6
4	Analisis Kebijakan	2	-	2
Jumlah		10	3	13

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tahun 2021, diolah

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal

No	Jenis Pendidikan	L	P	Jumlah Pegawai
1	Diklat PIM II	1	0	1
2	Diklat PIM III	1	0	1
3	Diklat PIM IV	6	1	7
4	Diklat Teknis Perhubungan	18	1	19
5	Diklat PPNS	3	0	3
Jumlah		29	2	31

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tahun 2020, diolah

2.4 Sarana dan Prasarana

Prasarana aparatur pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terdiri dari :

1. Gedung Kantor Dinas Perhubungan yang terletak di Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
2. Gedung Kantor Terminal Cibeureum (Type C) yang terletak di Jl. Letkol Basyir Surya Kelurahan Awipari, Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
3. Gedung Kantor Bidang Angkutan dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang terletak di Komplek Dinas Perhubungan Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;
4. Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Terminal yang terletak di Komplek Dinas Perhubungan Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

5. Gedung Kantor UPTD Pengelolaan Parkir dan Workshop MRL yang terletak di Komplek Dinas Perhubungan Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya;

Sarana aparatur pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dapat diklasifikasikan menurut jenis dan fungsinya sebagai :

1. Kendaraan Jabatan yang terdiri dari :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 4 Unit untuk pejabat Eselon II dan III;
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 14 Unit untuk pejabat Eselon IV dan / setara eselon IV.
2. Kendaraan Operasional yang terdiri dari :
 - a. Kendaraan Roda 6 sebanyak 4 Unit untuk operasional seksi Fasilitas Lalu Lintas (Faslalin);
 - b. Kendaraan Roda 4 sebanyak 5 Unit untuk operasional seksi Dalops, UPTD Pengelolaan Parkir dan UPTD Terminal, operasional keselamatan, operasional umum;
 - c. Kendaraan Roda 2 sebanyak 20 Unit untuk operasional seksi Dalops, UPTD Pengelolaan Parkir, UPTD Terminal dan Kesekretariatan.
3. Peralatan Gedung Kantor dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Daftar Peralatan Gedung Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Alat Uji Emisi Gas Buang	1	Unit	Baik
2	Alat Uji Ketebalan Asap	2	Unit	Baik
3	Alat Uji Kebisingan	2	Unit	Baik
4	Alat Uji Rem	1	Unit	Baik
5	Alat Uji Lampu	1	Unit	Baik
6	Alat Uji Kincup Roda Depan	1	Unit	Baik
7	Alat Uji Penunjuk Kecepatan	2	Unit	Baik
8	Alat Pengukur Kedalaman Alur Ban	1	Unit	Baik
9	Alat Pengukur Berat	1	Unit	Baik
10	Alat Ukur Dimensi	1	Unit	Baik
11	Alat Uji Tembus Cahaya pada Kaca	1	Unit	Baik
12	Alat Uji Minyak Rem	1	Unit	Baik
13	Kompresor Udara	1	Unit	Baik
14	Generator Set	1	Set	Baik

15	Peralatan Bantu (Dongkrak,Pengungkit,Palu,Senter,Meteran, Toolkit,lain-lain)			
----	--	--	--	--

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan, tahun 2021, diolah.

4. Perlengkapan Kantor dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Daftar Perlengkapan Gedung Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Ac Unit	15	Unit	Baik
2	Camera Electronic	3	Unit	Baik
3	Dispencer	8	Unit	Baik
4	Filling Besi/Metal	13	Unit	Baik
5	Brankas	1	Unit	Baik
6	Mesin Absen (Time Recorder)	3	Unit	Baik
7	Sound System	2	Unit	Baik
8	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2021, diolah

5. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Daftar Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	3	Unit	Baik
2	Handy Talky (Ht)	29	Unit	Baik
3	Kompor Gas	1	Unit	Baik
4	Mesin Bor Beton	1	Unit	Baik
5	Mesin Bor Tangan	1	Unit	Baik
6	Peralatan Tukang Besi Lain-lain/ catok besi	1	Unit	Baik
7	Mesin Potong Rumput	2	Unit	Baik
8	P.C. Unit/Laptop	32	Unit	Baik
9	Pompa Tangan	3	Unit	Baik
10	Portable Water Pump	2	Unit	Baik
11	Printer	28	Unit	Baik
12	Proyektor +Attachment	1	Unit	Baik
13	Radio	1	Unit	Baik
14	Stationary Water Pump	2	Unit	Baik
15	Tabung Gas	1	Unit	Baik
16	Televisi	6	Unit	Baik
17	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	1	Unit	Baik
18	Recalver Hf/Lf	3	Unit	Baik
19	Scanner	4	Unit	Baik
20	Unintemptible Power Supply	1	Unit	Baik

	(Ups)			
21	Unit Pembangkit Uap Air Panas Lain-Lain	1	Unit	Baik
22	Unit Power Supply	11	Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2021, diolah

6. Meubelair dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Daftar Meubelair

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Kursi Biasa	1	Unit	Baik
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13	Unit	Baik
3	Kursi Lipat	40	Unit	Baik
4	Kursi Tamu	8	Unit	Baik
5	Lemari Es	1	Unit	Baik
6	Lemari Kayu	11	Unit	Baik
7	Meja 1/2 Biro	6	Unit	Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit	Baik
9	Meja Piket	2	Unit	Baik
10	Meja Rapat	2	Unit	Baik
11	Rak-Rak Penyimpanan	9	Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2021, diolah

2.5 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Kinerja pelayanan kepada masyarakat dapat digambarkan dengan ketersediaan perlengkapan jalan berupa prasarana, sarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan yang cukup memadai. Selanjutnya kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya selama periode renstra 2017-2022 digambarkan dengan data pembangunan, tabel 2.11 dan data-data perlengkapan jalan menurut beberapa kriteria tertentu tabel 2.12 sd tabel 2.20. Data tersebut merupakan kondisi pada tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.11
Pembangunan Urusan Perhubungan
Dari Tahun 2018-2021

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rambu terpasang	Unit	1.840	1.867	1.877	2002	2006
2.	Jumlah Marka Jalan terpasang	m ²	590,20	1.571,2	1.571,2	3.051,2	3.622,2
3.	Jumlah Traffic light terpasang	Lokasi	18	19	20	21	21
4.	Jumlah Warning Light terpasang	Lokasi	48	48	49	49	49
5.	Jumlah PJU terpasang	Unit	7.865	8.900	9.749	10.099	11.030
6.	Jumlah Halte/shelter terbangun	Unit	31	27*	33	33	33
7.	Jumlah Guardrail terbangun	m ²	261	261	261	261	261
8.	Jumlah ATCS terpasang	Unit	17	19	23	24	24
9.	Jumlah Terminal terbangun	Buah	4	4	5	5	5

Sumber : Seksi Fasilitas Lalu Lintas tahun 2021, diolah

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 2018 s.d 2021, rambu terpasang sebanyak 166 unit, marka jalan terpasang sebanyak 3.032m², traffic light terpasang di 3 lokasi, warning light terpasang di 1 lokasi, penerangan jalan umum terpasang sebanyak 3.165 unit, shelter terbangun sebanyak 2 unit, ATCS terpasang sebanyak 7 unit. Dan guardrail selama periode renstra 2027-2022 tidak ada pembangunan.

Selanjutnya, kondisi perlengkapan jalan yang ada di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021, digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.12
Kondisi Rambu-Rambu Lalu Lintas
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan	2021		
			Terpasang	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Jalan Nasional	230	175	120	55
2	Jalan Provinsi	726	256	135	121
3	Jalan Kota	1.750	1.575	791	784
Jumlah		2.706	2.006	1.046	960

Sumber : Seksi Fasilitas Lalu Lintas tahun 2021, diolah

Kota Tasikmalaya perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas sebanyak 2.706 unit. Saat ini telah terpasang sebanyak 2.006 unit di lokasi jalan Nasional, Provinsi dan Kota, dimana 1.046 unit kondisi baik, 960 unit kondisi rusak. Dengan demikian, rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang sebanyak 700 unit dan 960 diperlukan perbaikan/penggantian.

Tabel 2.13
Marka Jalan Menurut Kondisinya Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (m ²)	2021			
			Terpasang (m ²)	Kondisi		
				Baik (%)	Sedang (%)	Pudar (%)
1	Jalan Nasional	947,2	807	50	20	30
2	Jalan Provinsi	3.654,1	1.543	30	40	30
3	Jalan Kota	4.022,29	1.272,2	85	20	20
	Jumlah	8.623,59	3.622,2	55	27	27

Sumber : Seksi Fasilitas Lalu Lintas tahun 2021, diolah

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Kota Tasikmalaya telah memasang marka jalan sepanjang 3.622,2 meter persegi. Marka jalan dalam kondisi baik sebagian besar terletak di Jalan Kota sebanyak 85% dalam kondisi baik, sedangkan kondisi marka yang pudar terletak disekitar jalan nasional dan provinsi sebesar 30%.

Kebutuhan marka jalan yang harus dibuat sebesar 8.623,59 meter persegi yang tersebar di jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, sehingga kekurangan pembangunan marka sepanjang 5.001,39 m².

Tabel 2.14
Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (unit)	Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)
1	Jalan Nasional	552	240	232
2	Jalan Provinsi	1.844	676	452
3	Jalan Kota	11.604	10.114	10.087
Jumlah		14.000	11.030	10.771

Sumber : Seksi Fasilitas Lalu Lintas tahun 2021, diolah

Jumlah PJU dibutuhkan di Kota Tasikmalaya sebanyak 14.000 unit untuk jalan Nasional, Provinsi dan Kota. Adapun PJU yang terpasang sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 11.030 unit, dengan 97,65% (10.771 unit) berfungsi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, masih dibutuhkan pemasangan PJU sebanyak 2.970 unit.

Tabel 2.15
Fasilitas Penyebrangan (Zebra Cross) Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Fasilitas	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)
1	Jalan Nasional	30	20	Baik
2	Jalan Provinsi	70	46	Baik
3	Jalan Kota	120	86	Baik
Jumlah		220	152	Baik

Sumber : Seksi Fasilitas Lalu Lintas tahun 2021, diolah

Fasilitas penyebrangan (Zebra Cross) di Kota Tasikmalaya dibutuhkan 220 buah, dan telah terpasang sampai tahun 2021

yaitu 152 buah dengan kondisi baik, sehingga masih perlu dilakukan pemasangan Zebra Cross sebanyak 68 buah.

Tabel 2.16
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Jenis lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)	Kondisi (buah)	
				Berfungsi	Tidak
1	Jalan Nasional	8	6	6	-
2	Jalan Provinsi	7	4	4	-
3	Jalan Kota	12	8	7	1
Jumlah		27	18	17	1

Sumber : Seksi Fasilitas Lalu Lintas tahun 2021, diolah

Berdasarkan kebutuhan ruas jalan yang berada di Kota Tasikmalaya, diperlukan 27 buah alat pemberi isyarat lalu lintas. Yang telah terpasang sebanyak 18 unit dengan kondisi 17 berfungsi dan 1 tidak berfungsi. Masih terdapat selesih kebutuhan alat pemberi isyarat yaitu sebanyak 9 buah

Tabel 2.17
Guard Rail (Pagar Pengaman) Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (meter)	Terpasang (meter)
1	Jalan Nasional	-	0
2	Jalan Provinsi	700	200
3	Jalan Kota	300	61
Jumlah		1.000	261

Sumber : Seksi Fasilitas Lalu Lintas tahun 2021, diolah

Kota Tasikmalaya memerlukan pagar pengaman untuk jalan Provinsi dan jalan Kota yaitu sebesar 1000 m, yang baru terpasang 261 m, sehingga masih perlu dibangun guard rail sepanjang 739 m.

Tabel 2.18
Cermin Tikungan Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)
1	Jalan Nasional	4	0
2	Jalan Provinsi	6	0
3	Jalan Kota	20	2
Jumlah		30	2

Sumber : Seksi Fasilitas Lalu Lintas tahun 2021, diolah

Berdasarkan kebutuhan untuk keselamatan jalan, fasilitas cermin tikungan sebanyak 30 buah, yang terpasang baru 2 buah. Sehingga masih diperlukan pemasangan cermin tikungan sebanyak 28 buah.

Tabel 2.19
Pita Penggaduh Menurut Kondisinya
Tahun 2021

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)
1	Jalan Nasional	10	6
2	Jalan Provinsi	8	4
3	Jalan Kota	25	12
Jumlah		43	22

Sumber : Seksi Fasilitas Lalu Lintas tahun 2021, diolah

Pita Penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan saat berkendara pada waktu mendekati ruas jalan yang dianggap perlu perlambatan dan konsentrasi lebih. Pita penggaduh berupa bagian jalan yang sengaja dibuat tidak rata dengan menempatkan pita-pita setebal 10 sampai 40 mm. Pita penggaduh biasanya ditempatkan pada ruas jalan/perlintasan sebidang, ruas jalan terdapat sekolah,

menjelang pintu tol atau ruas – ruas jalan yang diperlukan perlambatan laju kendaraan.

Kebutuhan pita pengaduh di jalan Nasional, Provinsi dan Kota yaitu sebanyak 43 buah, dan telah terpasang sampai tahun 2021_ sebanyak 22 buah, sehingga masih kurang 21 buah.

Tabel 2.20
Ruang Parkir Pada Badan Jalan
Tahun 2021

No	Lokasi	Jml Ruas	Panjang jalan yg terdapat rambu parkir (Km)	Panjang jalan yg digunakan parkir (Km)
1	Jalan Nasional	-	-	-
2	Jalan Provinsi	1	-	0,25
3	Jalan Kota	33	8,8	7,8
Jumlah		34	8,8	7,825

Sumber : Seksi Fasilitas Lalu Lintas tahun 2021, diolah

Ketersediaan fasilitas perparkiran menurut jenis dan kondisinya sampai dengan tahun 2021, pada badan jalan direncanakan 8,8 km dan telah digunakan 7,825 km. Sehingga hampir keseluruhan telah digunakan (92,06%).

Tabel 2.21
Terminal Angkutan Penumpang
Tahun 2021

No.	Nama Terminal	Tipe	Luas (Ha)	Instansi Pengelola
1.	Terminal Indihiang	A	7,50	Kementerian PHB
2.	Terminal Pancasila	C	0,30	Dishub
3.	Terminal Padayungan	C	0,23	Dishub
4.	Terminal Cikurubuk	C	0,29	Dishub
5.	Terminal Awipari	C	1,49	Dishub

Sumber : Seksi Teknis Sarana Angkutan tahun 2021, diolah

Kota Tasikmalaya memiliki 5 terminal, 1 terminal tipe A, dan 4 terminal tipe C. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan

Tahun 2017 - 2022, direncanakan akan dibangun terminal tipe C Batunungku. Namun sampai dengan tahun 2021 pembangunan terminal Batunungku baru terealisasi 20%.

Penentuan tipe dan kelas terminal dilakukan berdasarkan fungsi pelayanan, fasilitas pelayanan dan kewenangan. Berdasarkan fungsi pelayanannya, terminal penumpang diklasifikasikan kedalam tiga tipe terminal (PP RI No.43 tahun 1993) yaitu:

1. Terminal penumpang Tipe A, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
2. Terminal penumpang Tipe B, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinasi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
3. Terminal penumpang Tipe C, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).

Untuk pelayanan angkutan penumpang umum khususnya angkutan kota pada tahun 2021 terdapat 16 Tempat Pemberhentian Kendaraan (TPK) yang tersebar berdasarkan jalur/ trayek angkutan kota yaitu :

1. TPK Nyantong
2. TPK Muncang
9. TPK Awiluar
10. TPK Gobang

3. TPK Cikadongdong
4. TPK Leuwidahu
5. TPK Karangresik
6. TPK Cigeureung
7. TPK Gegernoong
8. TPK Cipeusar
11. TPK Cibunigeulis
12. TPK Asta
13. TPK Pamipiran
14. TPK Bumi Resik
15. Panglayungan
16. TPK Sindang Galih
17. TPK Perum Kota Baru

Tabel 2.22
Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2021

MOBIL BARANG						KERETA GANDENGAN	KERETA TEMPELAN	MOBIL BUS		KHUSUS		MOBIL PENUMPANG		TOTAL		
KECIL		SEDANG		BESAR				U	BU	U	BU	U	BU		U	BU
U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU			
2.240	6.300	1.564	2.411	379	222	0	5	27	182	2.196	234	72	39	218	18	16.107

Sumber : UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, tahun 2021, diolah

Tabel 2.23
Data Trayek Angkutan Kota
Tahun 2021

No	No/ kode trayek	Panjang trayek (km)	Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum				Sisa
			Alokasi	Realisasi	Status		
					Aktif	Non Aktif	
1	01	27	91	91	49	42	0
2	02	16	52	49	10	39	3
3	03	19,5	125	122	50	72	3
4	04	23	100	92	53	39	8
5	05	23,5	150	141	59	82	9
6	06	23	33	21	14	7	12

7	07	23	70	63	32	31	7
8	08	23	70	60	11	49	10
9	09	25	56	27	11	16	29
10	09 A	30	35	32	21	11	3
11	010	34,5	71	67	31	36	4
12	011	16	19	19	10	9	0
13	012	15	28	23	15	8	5
14	012 A	20	4	2	0	2	2
15	013	26	50	47	20	27	3
16	014	33	20	16	9	7	4
17	015	44	35	31	11	20	4
18	016	28	35	21	7	14	14
19	017	13	35	35	23	12	0
20	018	19,5	40	25	12	13	15
21	019	28	19	18	8	10	1
Jumlah			1.138	1.002	456	546	136

Sumber : Seksi Bina Usaha Angkutan, tahun 2021, diolah

2.6 Kinerja Pelayanan Sektor Pendapatan Dan Pembiayaan Pembangunan

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya merupakan salah satu perangkat daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum :
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Retribusi Jasa Usaha :
 - Retribusi Jasa Terminal;
3. Retribusi Perizinan Tertentu :
 - Retribusi Izin Trayek

Perkembangan pendapatan Asli Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dari tahun 2018-2021 adalah :

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Pendapatan
Periode Renstra Tahun 2017-2022

NO	NAMA RETRIBUSI	TAHUN 2018-2021		
		TARGET	REALISASI	%
1	PARKIR TEPI JALAN UMUM	8.587.404.000	6.092.774.000	70,95
2	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	8.156.603.000	8.440.558.900	103,48
3	TERMINAL	2.227.230.000	2.088.571.500	93,77
4	IJIN TRAYEK	619.350.000	548.104.000	88,50
JUMLAH		19.590.587.000	17.170.008.400	87,64

Sumber : Subbag PEP dan Keuangan, tahun 2021

Capaian kinerja penerimaan pendapatan dan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya pada

periode renstra 2017-2022, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun pelaksanaan renstra mengalami penurunan. Rata-rata capaian target penerimaan selama periode tersebut 17.170.008.400 dari target yang ditetapkan yaitu 19.590.587.000 atau sebesar 87,64%. Hanya penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang bisa dipertahankan sehingga capaiannya sebesar 103,48% atau 3,48% melebihi target yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kinerja penerimaan pendapatan asli daerah mengalami kondisi sebagaimana disebutkan di atas antara lain faktor eksternal dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan pengendalian penyebaran pandemi covid-19 dan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun. Sebagaimana diketahui pada tahun 2019 dan 2020 adalah masa dimana pandemic covid-19 berada pada angka tertinggi penyebarannya. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran pandemic covid-19 tersebut yang mana sektor transportasi menjadi sangat terdampak.

Selain itu, di masa periode renstra tersebut terjadi kondisi sebagai berikut :

1. adanya peningkatan jumlah kendaraan yang tidak melaksanakan pengujian kendaraan dampak dari adanya kebijakan program Zero Odol (Over Dimensi Over Load) Kendaraan Angkutan Barang dari Kementrian Perhubungan R.I;

2. menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, berdampak terhadap disiplin pemilik/awak angkutan kota untuk memperpanjang ijin trayek, dan;
3. adanya eksistensi kendaraan angkutan penumpang berbasis online/ojol.

Secara rinci capaian kinerja penerimaan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya sebagaimana tabel 2.25 di bawah ini :

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Pendapatan Tahunan Per Objek Pendapatan
Periode Renstra 2017-2022

NO	NAMA RETRIBUSI	TAHUN											
		2018			2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	PARKIR TEPI JALAN UMUM	2.016.908.000	2.017.105.000	100,01	2.142.908.000	1.988.315.000	92,79	2.016.092.000	1.301.864.000	64,57	2.411.496.000	785.490.000	32,57
2	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	2.150.148.000	2.417.391.700	112,43	2.257.650.000	2.299.057.100	101,83	1.738.400.000	1.881.790.000	108,25	2.010.405.000	1.842.320.100	91,64
3	TERMINAL	746.972.500	705.506.500	94,45	746.972.500	666.300.000	89,20	387.265.000	367.265.000	94,84	346.020.000	349.500.000	101,01
4	IJIN TRAYEK	206.450.000	167.620.500	81,19	206.450.000	171.384.000	83,01	103.225.000	104.240.500	100,98	103.225.000	104.859.000	101,58
JUMLAH		5.120.478.500	5.307.623.700	103,65	5.353.980.500	5.125.056.100	95,72	4.244.982.000	3.655.159.500	86,11	4.871.146.000	3.082.169.100	63,27

Sumber : Subag PEP dan Keuangan, tahun 2021

Perkembangan penggunaan anggaran pembiayaan program dan kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Keuangan Pembiayaan Pembangunan
Periode Renstra Tahun 2017-2022

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN (%)	
				KEUA NGAN	FISIK
2018	50.270.925.863	50.034.813.387	236.112.476	99,53	100,00
2019	49.688.561.515	49.363.627.121	324.934.394	99,35	100,00
2020	49.271.908.171	48.106.987.094	1.164.921.077	97,61	100,00
2021	45.590.874.900	45.352.745.726	238.129.174	99,48	100,00
JML	194.822.270.449	192.858.173.328	1.964.097.121	98,99	100,00

Sumber : Subag PEP dan Keuangan, tahun 2021

Capaian kinerja keuangan dan fisik selama 4 (empat) tahun pelaksanaan periode renstra 2017-2022, tiap tahun jumlah anggaran mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,15%, kondisi ini sedikitnya berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022. Disisi lain realisasi kinerja keuangan menunjukkan arah yang baik , rata-rata capaian kinerja sebesar 98,99% dan capaian fisik sebesar 100% dalam arti semua program/kegiatan/sub kegiatan terlaksana sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya rasio dari tahun ke tahun relatif baik berada di atas 97%. Dimana pencapaian tertinggi berada pada tahun pertama masa pelaksanaan renstra yaitu tahun 2018 sebesar 99,53%.

Capaian kinerja keuangan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 97,61%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.164.921.077. Hal ini bukan berarti terjadinya penurunan kinerja program dan kegiatan /sub kegiatan namun sebaliknya hal itu disebabkan karena terjadi efisiensi pada pembayaran listrik penerangan jalan umum (PJU) atas upaya melaksanakan penurunan daya dari 250 watt ke 90-100 watt melalui penggantian bohlam dari jenis sodium ke jenis led terhadap beberapa unit lampu penerangan jalan umum.

Secara rinci capaian kinerja keuangan pembiayaan pembangunan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Periode Renstra Tahun 2017-2022

Tahun Anggaran 2018

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN							
	SUMBER			JUMLAH	REALISASI		SISA ANGGARAN	PENCAPAIAN FISIK (%)
	APBD KOTA	APBD PROV	APBN		KEU (Rp)	%		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.736.965.515	0	0	9.736.965.515	9.736.569.208	100,00	396.307	100,00
BELANJA PEGAWAI	9.736.965.515	0	0	9.736.965.515	9.736.569.208	100,00	396.307	100,00
Gaji dan Tunjangan	5.490.211.775	0	0	5.490.211.775	5.508.013.004	100,32	(17.801.229)	100,00
Tambahan Penghasilan PNS	3.990.729.815	0	0	3.990.729.815	3.972.913.015	99,55	17.816.800	100,00
Insentif Pemungutan Retribusi	256.023.925	0	0	256.023.925	255.643.189	99,85	380.736	100,00
BELANJA LANGSUNG	39.951.596.000	0	0	39.951.596.000	39.627.057.913	99,19	324.538.087	100,00
BELANJA LANGSUNG NON URUSAN (BLNU)	28.791.593.808	0	0	28.791.593.808	28.579.390.239	99,26	212.203.569	100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	26.718.415.008	0	0	26.718.415.008	26.516.443.791	99,24	201.971.217	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	0	0	2.500.000	2.499.000	99,96	1.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.478.500.000	0	0	25.478.500.000	25.293.470.280	99,27	185.029.720	100,00
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	50.000.000	0	0	50.000.000	48.983.546	97,97	1.016.454	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	50.230.000	0	0	50.230.000	42.413.600	84,44	7.816.400	100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	51.067.608	0	0	51.067.608	50.446.800	98,78	620.808	100,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	35.000.000	0	0	35.000.000	34.938.500	99,82	61.500	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000	0	0	45.000.000	44.836.000	99,64	164.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.578.000	0	0	102.578.000	102.323.500	99,75	254.500	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0	0	10.000.000	9.911.000	99,11	89.000	100,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	0	0	10.000.000	9.939.600	99,40	60.400	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	0	0	3.000.000	2.998.035	99,93	1.965	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	0	0	45.000.000	44.865.000	99,70	135.000	100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	40.000.000	0	0	40.000.000	39.944.000	99,86	56.000	100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	225.000.000	0	0	225.000.000	224.872.665	99,94	127.335	100,00
Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	72.484.200	0	0	72.484.200	71.197.200	98,22	1.287.000	100,00
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	498.055.200	0	0	498.055.200	492.805.065	98,95	5.250.135	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.888.178.800	0	0	1.888.178.800	1.879.050.448	99,52	9.128.352	100,00
Pengadaan Mobil Jabatan	306.650.000	0	0	306.650.000	306.650.000	100,00	-	100,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	0	0	15.000.000	14.982.000	99,88	18.000	100,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	0	0	-	-	-	-	-
Pengadaan Meubelair	28.350.000	0	0	28.350.000	28.270.000	99,72	80.000	100,00
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	20.000.000	0	0	20.000.000	19.811.000	99,06	189.000	100,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	116.630.000	0	0	116.630.000	116.619.262	99,99	10.738	100,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	271.254.000	0	0	271.254.000	271.229.086	99,99	24.914	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	5.000.000	0	0	5.000.000	4.993.900	99,88	6.100	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	5.000.000	0	0	5.000.000	4.972.000	99,44	28.000	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	100,00	-	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	590.000.000	0	0	590.000.000	584.933.000	99,14	5.067.000	100,00
Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	50.294.800	0	0	50.294.800	50.026.700	99,47	268.100	100,00
Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor	365.000.000	0	0	365.000.000	361.591.000	99,07	3.409.000	100,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.000.000	0	0	110.000.000	109.972.500	99,98	27.500	100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	85.000.000	0	0	85.000.000	84.711.000	99,66	289.000	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	25.000.000	0	0	25.000.000	24.871.000	99,48	129.000	100,00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	60.000.000	0	0	60.000.000	59.840.000	99,73	160.000	100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	70.000.000	0	0	70.000.000	69.425.000	99,18	575.000	100,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	0	0	30.000.000	29.995.000	99,98	5.000	100,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	10.000.000	0	0	10.000.000	9.982.000	99,82	18.000	100,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	0	0	10.000.000	9.905.000	99,05	95.000	100,00
Penyusunan Laporan Barang Semesteran	10.000.000	0	0	10.000.000	9.748.000	97,48	252.000	100,00
Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun	10.000.000	0	0	10.000.000	9.795.000	97,95	205.000	100,00
Program Perencanaan Kerja	30.000.000	0	0	30.000.000	29.760.000	99,20	240.000	100,00
Penyusunan Rencana Kerja	20.000.000	0	0	20.000.000	19.844.000	99,22	156.000	100,00
Penyusunan Rencana Strategis	10.000.000	0	0	10.000.000	9.916.000	99,16	84.000	100,00
BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB / PILIHAN (BLUW/P)	11.160.002.192	0	0	11.160.002.192	11.047.667.674	98,99	112.334.518	100,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	500.000.000	0	0	500.000.000	488.785.000	97,76	11.215.000	100,00
Pembangunan Terminal Type C Batunungku	500.000.000	0	0	500.000.000	488.785.000	97,76	11.215.000	100,00
Program Pengembangan Data/Informasi	65.872.192	0	0	65.872.192	65.179.008	98,95	693.184	100,00
Penyediaan Data/Informasi Perhubungan	65.872.192	0	0	65.872.192	65.179.008	98,95	693.184	100,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	2.031.333.400	0	0	2.031.333.400	2.025.916.856	99,73	5.416.544	100,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan	456.000.000	0	0	456.000.000	452.727.500	99,28	3.272.500	100,00

Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor								
Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	1.375.333.400	0	0	1.375.333.400	1.374.375.756	99,93	957.644	100,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light	100.000.000	0	0	100.000.000	99.570.000	99,57	430.000	100,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	25.000.000	0	0	25.000.000	24.808.600	99,23	191.400	100,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte / Shelter	25.000.000	0	0	25.000.000	24.900.000	99,60	100.000	100,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal	50.000.000	0	0	50.000.000	49.535.000	99,07	465.000	100,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	207.293.000	0	0	207.293.000	206.181.712	99,46	1.111.288	100,00
Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal Type C	119.293.000	0	0	119.293.000	119.291.712	100,00	1.288	100,00
Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal & Tahun Baru	43.000.000	0	0	43.000.000	42.012.000	97,70	988.000	100,00
Penyuluhan Bagi para Sopir/Awak Kendaraan Angkutan Umum	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	100,00	-	100,00
Pembangunan Tempat-Tempat Perberhentian Angkutan Umum	30.000.000	0	0	30.000.000	29.878.000	99,59	122.000	100,00
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	6.603.500.000	0	0	6.603.500.000	6.569.841.520	99,49	33.658.480	100,00
Pengadaan Rambu-Rambu lalu Lintas	50.000.000	0	0	50.000.000	49.478.000	98,96	522.000	100,00
Pengadaan Marka Jalan	175.000.000	0	0	175.000.000	174.612.900	99,78	387.100	100,00
Pengadaan Penerangan Jalan Umum	5.958.500.000	0	0	5.958.500.000	5.936.712.620	99,63	21.787.380	100,00
Pemasangan Traffic Light dan Warning Light	40.000.000	0	0	40.000.000	39.408.000	98,52	592.000	100,00
Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	30.000.000	0	0	30.000.000	29.975.000	99,92	25.000	100,00
Pembangunan ATCS	200.000.000	0	0	200.000.000	198.495.000	99,25	1.505.000	100,00
Pembangunan Pos Gatur Lalin	150.000.000	0	0	150.000.000	141.160.000	94,11	8.840.000	100,00
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	548.812.600	0	0	548.812.600	545.484.884	99,39	3.327.716	100,00
Penyediaan Kelengkapan	472.225.000	0	0	472.225.000	468.897.500	99,30	3.327.500	100,00

Administrasi Pelaksanaan PKB									
Penunjang Operasional PKB	76.587.600	0	0	76.587.600	76.587.384	100,00	216	100,00	
Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas	420.305.000	0	0	420.305.000	370.298.996	88,10	50.006.004	100,00	
Pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas	164.865.200	0	0	164.865.200	164.864.628	100,00	572	100,00	
Penunjang Operasional ATCS	205.439.800	0	0	205.439.800	205.434.368	100,00	5.432	100,00	
Tanggap Darurat Perhubungan	50.000.000	0	0	50.000.000	-	-	50.000.000	-	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	75.000.000	0	0	75.000.000	74.246.370	99,00	753.630	100,00	
Musrenbang Sektoran Bidang Perhubungan	25.000.000	0	0	25.000.000	24.806.000	99,22	194.000	100,00	
Sinergitas PEP Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan	50.000.000	0	0	50.000.000	49.440.370	98,88	559.630	100,00	
Program Peningkatan Optimalisasi Perhubungan	707.886.000	0	0	707.886.000	701.733.328	99,13	6.152.672	100,00	
Pengawasan/Pembinaan Petugas Parkir	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	100,00	-	100,00	
Sosialisasi Tertib Lalu Lintas	25.000.000	0	0	25.000.000	24.774.000	99,10	226.000	100,00	
Pengawasan Angkutan Umum	9.000.000	0	0	9.000.000	8.895.000	98,83	105.000	100,00	
Kegiatan Car Free Day	52.200.000	0	0	52.200.000	52.168.000	99,94	32.000	100,00	
Sosialisasi Keselamatan Anak Sekolah	160.000.000	0	0	160.000.000	159.601.000	99,75	399.000	100,00	
Operasional Pengelolaan Parkir	441.686.000	0	0	441.686.000	436.295.328	98,78	5.390.672	100,00	
JUMLAH TOTAL	49.688.561.515	0	0	49.688.561.515	49.363.627.121	99,35	324.934.394	100,00	

Anggaran Tahun 2019

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN							PENCAPAIAN FISIK (%)
	SUMBER			JUMLAH	REALISASI		SISA ANGGARAN	
	APBD KOTA	APBD PROV	APBN		KEU (Rp)	%		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.921.701.020	0	0	9.921.701.020	9.957.322.901	100,36	-35.621.881	100,00
BELANJA PEGAWAI	9.921.701.020	0	0	9.921.701.020	9.957.322.901	100,36	-35.621.881	100,00
Gaji dan Tunjangan	5.561.493.610	0	0	5.561.493.610	5.919.514.703	106,44	-358.021.093	100,00
Tambahan Penghasilan PNS	4.092.508.000	0	0	4.092.508.000	3.771.174.743	92,15	321.333.257	100,00
Belanja Retribusi	267.699.410	0	0	267.699.410	266.633.455	99,60	1.065.955	100,00
BELANJA LANGSUNG	40.349.224.843	0	0	40.349.224.843	40.077.490.486	99,33	271.734.357	100,00
BELANJA LANGSUNG NON	28.878.915.493	0	0			99,62	110.471.274	100,00

URUSAN (BLNU)				28.878.915.493	28.768.444.219			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.898.152.493	0	0	27.898.152.493	27.836.528.227	99,78	61.624.266	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	0	0	2.500.000	2.490.000	99,60	10.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.761.988.333	0	0	26.761.988.333	26.760.272.067	99,99	1.716.266	100,00
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	50.000.000	0	0	50.000.000	47.295.991	94,59	2.704.009	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	81.000.000	0	0	81.000.000	46.742.800	57,71	34.257.200	100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	57.135.984	0	0	57.135.984	54.512.320	95,41	2.623.664	100,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000	0	0	25.000.000	24.999.499	100,00	501	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000	0	0	45.000.000	44.924.000	99,83	76.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.000.000	0	0	110.000.000	101.896.250	92,63	8.103.750	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	0	0	5.000.000	4.995.000	99,90	5.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	0	0	10.000.000	9.812.000	98,12	188.000	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	0	0	3.000.000	2.991.524	99,72	8.476	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	100,00	-	100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	36.000.000	0	0	36.000.000	36.000.000	100,00	-	100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	225.000.000	0	0	225.000.000	224.984.850	99,99	15.150	100,00
Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	88.691.976	0	0	88.691.976	83.118.480	93,72	5.573.496	95,00
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	367.836.200	0	0	367.836.200	361.493.446	98,28	6.342.754	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	756.598.000	0	0	756.598.000	710.927.272	93,96	45.670.728	100,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	0	0	15.000.000	13.667.500	91,12	1.332.500	100,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	0	0	10.000.000	9.955.000	99,55	45.000	100,00
Pengadaan Meubelair	-	0	0	-	-		-	-
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	141.500.000	0	0	141.500.000	140.904.000	99,58	596.000	100,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	108.714.000	0	0	108.714.000	108.670.341	99,96	43.659	100,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	292.224.000	0	0	292.224.000	252.589.071	86,44	39.634.929	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	5.000.000	0	0	5.000.000	4.950.000	99,00	50.000	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	5.000.000	0	0	5.000.000	4.950.000	99,00	50.000	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	0	0	5.000.000	4.950.000	99,00	50.000	100,00
Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	27.500.000	0	0	27.500.000	27.349.500	99,45	150.500	100,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.660.000	0	0	146.660.000	142.941.860	97,46	3.718.140	100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	58.500.000	0	0	58.500.000	58.410.000	99,85	90.000	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	0	0	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	58.500.000	0	0	58.500.000	58.410.000	99,85	90.000	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	14.000.000	0	0	14.000.000	12.309.500	88	1.690.500	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.000.000	0	0	14.000.000	12.309.500	87,93	1.690.500	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	69.108.800	0	0	69.108.800	68.383.400	98,95	725.400	100,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.480.000	0	0	24.480.000	24.383.000	99,60	97.000	100,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	19.846.400	0	0	19.846.400	19.780.400	99,67	66.000	100,00
Penyusunan Pelaporan Barang	19.846.400	0	0	19.846.400	19.425.000	97,88	421.400	100,00

Perangkat Daerah									
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	4.936.000	0	0	4.936.000	4.795.000	97,14	141.000	100,00	
Program Perencanaan Kerja	82.556.200	0	0	82.556.200	81.885.820	99,19	670.380	100,00	
Penyusunan Rencana Kerja	19.465.200	0	0	19.465.200	19.401.200	99,67	64.000	100,00	
Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	43.091.000	0	0	43.091.000	42.649.620	98,98	441.380	100,00	
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	20.000.000	0	0	20.000.000	19.835.000	99,18	165.000	100,00	
BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB / PILIHAN (BLUW/P)	11.470.309.350	0	0	11.470.309.350	11.309.046.267	98,59	161.263.083	100,00	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.705.587.660	0	0	2.705.587.660	2.634.724.583	97,38	70.863.077	100,00	
Peningkatan Jaringan Trayek Angkutan Umum	14.978.100	0	0	14.978.100	14.971.000	99,95	7.100	100,00	
Kajian Angkutan Umum Kota Tasikmaya	22.570.000	0	0	22.570.000	21.846.000	96,79	724.000	100,00	
Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal	119.461.760	0	0	119.461.760	119.417.327	99,96	44.433	100,00	
Pengawasan Angkutan Umum	14.978.100	0	0	14.978.100	14.899.000	99,47	79.100	100,00	
Pembinaan Petugas Terminal	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	100,00	-	100,00	
Sosialisasi/Pembinaan Awak/Pengusaha Angkutan	23.578.500	0	0	23.578.500	23.283.000	98,75	295.500	100,00	
Pembangunan Terminal Type C	406.810.000	0	0	406.810.000	397.705.000	97,76	9.105.000	100,00	
Pembangunan Halte/Shelter	38.035.000	0	0	38.035.000	37.805.200	99,40	229.800	100,00	
Penyediaan Kelengkapan Administrasi PKB	566.743.800	0	0	566.743.800	563.462.950	99,42	3.280.850	100,00	
Operasionalisasi PKB	56.291.400	0	0	56.291.400	56.271.328	99,96	20.072	100,00	
Pengembangan Gedung PKB	480.125.000	0	0	480.125.000	470.630.000	98,02	9.495.000	100,00	
Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	52.800.000	0	0	52.800.000	51.450.000	97,44	1.350.000	100,00	
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Type C	800.000.000	0	0	800.000.000	784.209.500	98,03	15.790.500	100,00	
Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte / Shelter	19.035.000	0	0	19.035.000	18.963.000	99,62	72.000	100,00	
Pengelolaan Layanan Angkutan Publik	80.181.000	0	0	80.181.000	49.811.278	62,12	30.369.722	70,00	

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	8.628.456.640	0	0	8.628.456.640	8.539.363.265	98,97	89.093.375	100,00
Pengadaan Warning Light Konvensional	35.000.000	0	0	35.000.000	33.748.000	96,42	1.252.000	100,00
Pengadaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS	500.000.000	0	0	500.000.000	489.427.000	97,89	10.573.000	100,00
Pengadaan Rambu-Rambu lalu Lintas	35.000.000	0	0	35.000.000	34.860.000	99,60	140.000	100,00
Pemasangan Marka Jalan	180.000.000	0	0	180.000.000	160.753.760	89,31	19.246.240	100,00
Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	5.103.529.500	0	0	5.103.529.500	5.083.367.912	99,60	20.161.588	100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran	31.633.000	0	0	31.633.000	30.215.000	95,52	1.418.000	100,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light/Warning Light Konvensional	47.742.500	0	0	47.742.500	47.420.000	99,32	322.500	100,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS	95.227.500	0	0	95.227.500	95.227.500	100,00	-	100,00
Peningkatan CCROM ATCS	95.750.000	0	0	95.750.000	81.330.000	84,94	14.420.000	100,00
Integrasi ATCS Melalui Media Masa	55.000.000	0	0	55.000.000	49.390.000	89,80	5.610.000	100,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	24.162.500	0	0	24.162.500	24.147.500	99,94	15.000	100,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	1.325.971.840	0	0	1.325.971.840	1.320.959.208	99,62	5.012.632	100,00
Kajian Pengelolaan Parkir	22.570.000	0	0	22.570.000	22.450.000	99,47	120.000	100,00
Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu	22.570.000	0	0	22.570.000	22.450.000	99,47	120.000	100,00
Penyelenggaraan Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	24.039.500	0	0	24.039.500	23.875.000	99,32	164.500	100,00
Operasionalisasi Pengelolaan ATCS	168.135.000	0	0	168.135.000	167.837.547	99,82	297.453	100,00
Operasionalisasi Pengelolaan Perparkiran	157.708.800	0	0	157.708.800	156.622.919	99,31	1.085.881	100,00
Sosialisasi Keselamatan Anak Sekolah	46.536.000	0	0	46.536.000	46.147.000	99,16	389.000	100,00
Pembentukan Forum/Kelompok	17.880.500	0	0	17.880.500	17.840.000	99,77	40.500	100,00

Peduli Keselamatan								
Pengamanan Lalu Lintas	205.000.000	0	0	205.000.000	204.257.919	99,64	742.081	100,00
Pembinaan Petugas Parkir	20.000.000	0	0	20.000.000	19.997.000	99,99	3.000	100,00
Pengawasan Petugas Parkir	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	100,00	-	100,00
Penataan Lalu Lintas Pusat Kota	400.000.000	0	0	400.000.000	392.040.000	98,01	7.960.000	100,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik	136.265.050	0	0	136.265.050	134.958.419	99,04	1.306.631	100,00
Penyusunan Dokumen Pelayanan Publik	9.787.500	0	0	9.787.500	9.733.500	99,45	54.000	100,00
Pengelolaan Arsip Secara Elektronik	5.000.000	0	0	5.000.000	4.962.000	99,24	38.000	100,00
Penyusunan Profil Perangkat Daerah	19.787.500	0	0	19.787.500	19.700.500	99,56	87.000	100,00
Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	9.725.600	0	0	9.725.600	9.647.900	99,20	77.700	100,00
Penyediaan Data/Informasi Perangkat Daerah	19.214.450	0	0	19.214.450	18.820.000	97,95	394.450	100,00
Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	72.750.000	0	0	72.750.000	72.094.519	99,10	655.481	100,00
JUMLAH TOTAL	50.270.925.863	0	0	50.270.925.863	50.034.813.387	99,53	236.112.476	100,00

Anggaran Tahun 2020

PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER			ANGGARAN			SISA ANGGARAN Keu (Rp)	CAPAIAN FISIK %
	APBD KOTA	APBD PROV	APBN	JUMLAH	REALISASI			
					Keu (Rp)	%		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.998.505.272,00	-	-	8.998.505.272,00	8.887.124.642,00	98,76	111.380.630,00	100,00
BELANJA PEGAWAI	8.998.505.272,00	-	-	8.998.505.272,00	8.887.124.642,00	98,76	111.380.630,00	100,00
Gaji dan Tunjangan	5.465.467.272,00	-	-	5.465.467.272,00	5.415.895.967	99,09	49.571.305	100,00
Tambahan Penghasilan PNS	3.294.387.000,00	-	-	3.294.387.000,00	3.268.215.669	99,21	26.171.331	100,00
Insentif Pemungutan Retribusi	238.651.000,00	-	-	238.651.000,00	203.013.006	85,07	35.637.994	100,00
BELANJA LANGSUNG	40.213.582.899	59.820.000	-	40.273.402.899	39.219.862.452	97,35	1.053.540.447	100,00
BELANJA LANGSUNG NON URUSAN (BLNU)	32.854.058.221	-	-	32.854.058.221	31.934.965.892	97,20	919.092.329	100,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	30.503.916.081	-	-	30.503.916.081	29.588.201.240	97,00	915.714.841	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000	100,00	-	100,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.880.603.508	-	-	29.880.603.508	28.985.252.950	97,00	895.350.558	100,00
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	5.000.000	-	-	5.000.000	4.998.000	99,96	2.000	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	25.290.000	-	-	25.290.000	17.335.800	68,55	7.954.200	100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	62.775.576	-	-	62.775.576	59.555.680	94,87	3.219.896	100,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000	-	-	25.000.000	25.000.000	100,00	-	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	45.000.000	-	-	45.000.000	44.885.500	99,75	114.500	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.653.345	-	-	89.653.345	89.512.000	99,84	141.345	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.535.500	-	-	2.535.500	2.464.500	97,20	71.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	100,00	-	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	-	-	3.000.000	2.999.485	99,98	515	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	-	-	35.000.000	34.991.000	99,97	9.000	100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman	22.865.000	-	-	22.865.000	22.788.000	,66	77.000	100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	149.128.000	-	-	149.128.000	148.927.965	99,87	200.035	100,00
Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	97.151.364	-	-	97.151.364	90.701.520	93,36	6.449.844	100,00
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	53.413.788	-	-	53.413.788	51.288.840	96,02	2.124.948	100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.247.256.540	-	-	2.247.256.540	2.245.842.652	99,94	1.413.888	100,00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.483.900.000	-	-	1.483.900.000	1.483.900.000	100,00	-	100,00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	-	-	15.000.000	14.950.800	99,67	49.200	100,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Pengadaan Meubelair	14.000.000	-	-	14.000.000	13.981.300	99,87	18.700	100,00
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	15.000.000	-	-	15.000.000	14.575.000	97,17	425.000	100,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	99.890.000	-	-	99.890.000	99.557.774	99,67	332.226	100,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	208.660.000	-	-	208.660.000	208.638.738	99,99	21.262	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	2.500.000	-	-	2.500.000	2.490.000	99,60	10.000	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	2.500.000	-	-	2.500.000	2.475.000	99,00	25.000	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000	-	-	2.500.000	2.485.000	99,40	15.000	100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	351.152.500	-	-	351.152.500	350.650.000	99,86	502.500	100,00
Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	3.255.000	-	-	3.255.000	3.240.000	99,54	15.000	100,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.899.040	-	-	48.899.040	48.899.040	100,00	-	100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraruran Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000	-	-	30.000.000	29.856.000	99,52	144.000	100,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5.000.000	-	-	5.000.000	4.955.000	99,10	45.000	100,00

Realisasi Kinerja SKPD								
Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000	-	-	10.000.000	9.950.000	99,50	50.000	100,00
Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	10.000.000	-	-	10.000.000	9.997.000	99,97	3.000	100,00
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	5.000.000	-	-	5.000.000	4.954.000	99,08	46.000	100,00
Program Perencanaan Kerja	72.885.600	-	-	72.885.600	71.066.000	97,50	1.819.600	100,00
Penyusunan Rencana Kerja	7.500.000	-	-	7.500.000	7.401.000	98,68	99.000	100,00
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	10.000.000	-	-	10.000.000	9.893.500	98,94	106.500	100,00
Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	30.385.600	-	-	30.385.600	29.398.500	96,75	987.100	100,00
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	25.000.000	-	-	25.000.000	24.373.000	97,49	627.000	100,00
BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB / PILIHAN (BLUW/P)	7.359.524.678	59.820.000	-	7.419.344.678	7.284.896.560	98,01	134.448.118	100,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.177.950.800	59.820.000	-	1.237.770.800	1.209.229.634	97,69	28.541.166	100,00
Peningkatan Jaringan Trayek Angkutan Umum	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal	111.979.000	-	-	111.979.000	93.927.914	83,88	18.051.086	100,00
Pengawasan Angkutan Umum	10.597.000	-	-	10.597.000	10.509.000	99,17	88.000	100,00
Pembinaan Petugas Terminal	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Sosialisasi/Pembinaan Awak/Pengusaha Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Pembangunan Halte/Shelter	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Pengadaan Alat PKB	100.000.000	-	-	100.000.000	.902.600	99,90	97.400	100,00
Penyediaan Kelengkapan Administrasi PKB	551.500.000	-	-	551.500.000	550.000.000	99,73	1.500.000	100,00
Operasionalisasi PKB	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Pengembangan Gedung PKB	200.000.000	-	-	200.000.000	195.210.000	97,61	4.790.000	100,00
Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	175.000.000	-	-	175.000.000	172.198.205	98,40	2.801.795	100,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte / Shelter	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Pengelolaan Layanan Angkutan Publik	28.874.800	-	-	28.874.800	27.832.915	96,39	1.041.885	100,00	
Pembangunan Terminal Type C	-	59.820.000	-	59.820.000	59.649.000	99,71	171.000	100,00	
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	6.095.897.878	-	-	6.095.897.878	5.993.647.851	98,11	102.250.027	100,00	
Pengadaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS	400.000.000	-	-	400.000.000	392.513.000	98,13	7.487.000	100,00	
Pengadaan Rambu-Rambu lalu Lintas	150.000.000	-	-	150.000.000	147.812.500	98,54	2.187.500	100,00	
Pemasangan Marka Jalan	500.000.000	-	-	500.000.000	486.661.000	97,33	13.339.000	100,00	
Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	2.106.880.420	-	-	2.106.880.420	2.046.673.711	97,14	60.206.709	100,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran	48.066.000	-	-	48.066.000	47.781.149	99,41	284.851	100,00	
Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light/Warning Light Konvensional	150.000.000	-	-	150.000.000	149.335.000	99,56	665.000	100,00	
Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS	150.000.000	-	-	150.000.000	148.864.000	99,24	1.136.000	100,00	
Peningkatan CCROM ATCS	200.000.000	-	-	200.000.000	199.320.000	99,66	680.000	100,00	
Integrasi ATCS Melalui Media Masa	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	100,00	-	100,00	
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	1.563.918.780	-	-	1.563.918.780	1.559.845.271	99,74	4.073.509	100,00	
Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
Operasionalisasi Pengelolaan ATCS	253.085.878	-	-	253.085.878	242.638.520	95,87	10.447.358	100,00	
Operasionalisasi Pengelolaan	462.432.000	-	-	462.432.000	461.112.311	99,71	1.319.689	100,00	

Perparkiran								
Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Pembentukan Forum/Kelompok Peduli Keselamatan	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Pengamanan Lalu Lintas	68.514.800	-	-	68.514.800	68.091.389	99,38	423.411	100,00
Sosialisasi Tertib Lalu Lintas	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Pembinaan Petugas Parkir	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	100,00	-	100,00
Pengawasan Petugas Parkir	13.000.000	-	-	13.000.000	13.000.000	100,00	-	100,00
Keselamatan Jalan (DAK Penugasan 2020)	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Program Peningkatan Pelayanan Publik	85.676.000	-	-	85.676.000	82.019.075	95,73	3.656.925	100,00
Penyusunan Dokumen Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Pengelolaan Arsip Secara Elektronik	5.000.000	-	-	5.000.000	4.998.000	99,96	2.000	100,00
Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	10.700.000	-	-	10.700.000	10.600.000	99,07	100.000	100,00
Penyediaan Data/Informasi Perangkat Daerah	38.226.000	-	-	38.226.000	37.197.800	97,31	1.028.200	100,00
Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	31.750.000	-	-	31.750.000	29.223.275	92,04	2.526.725	100,00
TOTAL BELANJA	49.212.088.171	59.820.000	-	49.271.908.171	48.106.987.094	97,61	1.164.921.077,00	100,00

Anggaran Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN			JUMLAH	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	CAPAIAN FISIK (%)
	APBD KOTA	APBD PROV	APBN		Rp	%		
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	43.740.874.900	1.850.000.000	-	45.590.874.900	45.352.745.726	99,48	238.129.174	100,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.222.095.200	-	-	36.222.095.200	36.140.639.980	99,78	81.455.220	100,00
Perencanaan,	92.844.000	-	-	92.844.000	91.988.897	99,08	855.103	100,00

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.844.000	-	-	77.844.000	77.060.897	98,99	783.103	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	-	-	5.000.000	4.960.000	99,20	40.000	100,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	-	-	10.000.000	9.968.000	99,68	32.000	100,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.307.699.300	-	-	9.307.699.300	9.257.416.765	99,46	50.282.535	100,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.292.699.300	-	-	9.292.699.300	9.242.612.765	99,46	50.086.535	100,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	-	-	5.000.000	4.916.000	98,32	84.000	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	-	-	5.000.000	4.944.000	98,88	56.000	100,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	-	-	5.000.000	4.944.000	98,88	56.000	100,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	100,00	-	100,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	100,00	-	100,00	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000	-	-	5.000.000	4.722.000	94,44	278.000	100,00	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	-	-	5.000.000	4.722.000	94,44	278.000	100,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	100,00	
Peningkatan Sarana dan	-	-	-	-	-	-	-	100,00	

Prasarana Disiplin Pegawai								
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.418.400	-	-	266.418.400	266.040.789	99,86	377.611	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.900	-	-	2.498.900	2.494.000	99,80	4.900	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	0,00	-	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.910.500	-	-	12.910.500	12.875.500	99,73	35.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.025.000	-	-	57.025.000	56.890.200	99,76	134.800	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	-	-	25.000.000	24.900.000	99,60	100.000	100,00
Penyediaan Bahan/Material	40.000.000	-	-	40.000.000	39.919.900	99,80	80.100	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000	-	-	24.000.000	23.990.500	99,96	9.500	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.984.000	-	-	104.984.000	104.970.689	99,99	13.311	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.216.074.700	-	-	26.216.074.700	26.195.942.274	99,92	20.132.426	100,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.998.700	-	-	4.998.700	4.976.000	99,55	22.700	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.912.112.000	-	-	25.912.112.000	25.900.729.213	99,96	11.382.787	100,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	-	-	20.000.000	19.955.000	99,78	45.000	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278.964.000	-	-	278.964.000	270.282.061	96,89	8.681.939	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	304.058.800	-	-	304.058.800	294.529.255	96,87	9.529.545	100,00

Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.856.800	-	-	90.856.800	87.902.678	96,75	2.954.122	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.202.000	-	-	198.202.000	191.853.577	96,80	6.348.423	100,00
Pemeliharaan Mebel	5.000.000	-	-	5.000.000	4.873.000	97,46	127.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	-	-	5.000.000	4.945.000	98,90	55.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	-	-	5.000.000	4.955.000	99,10	45.000	100,00
Penataan Organisasi	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	100,00	-	100,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	100,00	-	100,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	7.518.779.700	1.850.000.000	-	9.368.779.700	9.212.105.746	98,33	156.673.954	100,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.579.019.500	1.850.000.000	-	7.429.019.500	7.418.461.238	99,86	10.558.262	100,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.078.639.500	1.850.000.000	-	5.928.639.500	5.923.868.623	99,92	4.770.877	100,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.500.380.000	-	-	1.500.380.000	1.494.592.615	99,61	5.787.385	100,00
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	232.252.000	-	-	232.252.000	231.842.920	100	409.080	100,00

Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	14.931.000	-		14.931.000	14.872.000	99,60	59.000	100,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	29.995.250	-		29.995.250	29.900.000	99,68	95.250	100,00
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	187.325.750	-	-	187.325.750	187.070.920	99,86	254.830	100,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	927.135.000	-	-	927.135.000	787.372.565	84,93	139.762.435	100,00
Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	455.600.000	-	-	455.600.000	385.929.346	84,71	69.670.654	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	471.535.000	-	-	471.535.000	401.443.219	85,14	70.091.781	100,00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	293.395.200	-	-	293.395.200	293.324.000	99,98	71.200	100,00
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	263.395.200	-	-	263.395.200	263.340.000	99,98	55.200	100,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000	-	-	25.000.000	25.000.000	100,00	-	100,00
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.000.000	-	-	5.000.000	4.984.000	99,68	16.000	100,00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	414.145.000	-	-	414.145.000	409.482.023	98,87	4.662.977	100,00

Kabupaten/Kota								
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10.000.000	-	-	10.000.000	9.544.000	95,44	456.000	100,00
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10.000.000	-	-	10.000.000	9.040.000	90,40	960.000	100,00
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	316.165.000	-	-	316.165.000	314.488.523	99,47	1.676.477	100,00
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	77.980.000	-	-	77.980.000	76.409.500	97,99	1.570.500	100,00
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	-	-	-	-	-	-	-	100,00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.833.000	-	-	72.833.000	71.623.000	98,34	1.210.000	100,00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.300.000	-	-	45.300.000	44.100.000	97,35	1.200.000	100,00
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	27.533.000	-	-	27.533.000	27.523.000	99,96	10.000	100,00

Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								
	43.740.874.900	1.850.000.000	-	45.590.874.900	45.352.745.726	99,48	238.129.174	100,00

Sumber : Subag PEP dan Keuangan, tahun 2021

Rekapitulasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam periode tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.28
Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Periode Renstra Tahun 2017-2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target			Realisasi		
				2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas dan angkutan jalan	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	%	52,76	63,45	74,23	61,93	76,06	88,21
2	Sinergitas manajemen dan rekayas lalu lintas dengan ketersediaan perlengkapan jalan yang berkualitas	Persentase Perlengkapan jalan yang berkualitas dan bersinergi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota	%	66,67	75	83,33	66,67	91,67	91,67

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target		Realisasi	
				2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas dan angkutan umum	Persentase kenyamanan berlalu lintas dan angkutan umum	%	84,92	96,48	88,03	dlm proses

Sumber : Subag PEP dan Keuangan, tahun 2021

Dalam periode pembangunan 4 (empat) tahun periode renstra tahun 2017-2022, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dapat mencapai target layanan yang direncanakan, beberapa diantaranya justru melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih ada beberapa target pelayanan yang belum dapat dipenuhi dengan tuntas, karena beberapa kendala yang dialami, baik kendala yang berkaitan dengan keterbatasan SDM, sarana pendukung kerja, maupun kendala yang berasal dari pihak luar, termasuk dampak dari adanya kebijakan penanggulangan pandemi covid-19.

Secara umum pencapaian target dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan realisasi relatif mempunyai nilai yang baik sesuai target yang telah ditetapkan. Penilai tertinggi kinerja berada di tahun ke-2 masa renstra 2017-2022 atau tahun 2019, dimana pada tahun tersebut diindikasikan dalam capaian indikator sasaran “Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan” sebesar 127,78% dan “Persentase Perlengkapan jalan yang berkualitas dan bersinergi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota” sebesar 122,22%.

Capaian tahun ke 4 (empat) periode renstra 2017-2022 untuk ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas

dan angkutan jalan sebanyak 330 ruas jalan dari data awal / baseline data tahun 2017 sebanyak 251 ruas jalan atau bertambah sebanyak 49 ruas jalan selama 4 (empat) tahun di periode renstra 2017-2022. Daftar ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (**cetak miring tebal**) sampai dengan tahun 2021 tersebut pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29
Daftar Ruas Jalan Yang Memenuhi Standar Keselamatan
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Periode Renstra Tahun 2017-2022

No	Nama Ruas	Panjang (Km)	Fasilitas Lalu Lintas		
			PJU	Rambu	Marka
1	Jl. Mayor SL.Tobing	2,458	43	7	2.458
2	Jl. Sambongpari	0,426	27	2	0,426
3	Jl. Sewaka SL Tobing	0,634	102	11	0,634
4	Jl. Brig .Sutoko	0,685	12	4	
5	Jl. R.A.A. Ardiwinangun	0,661	26	4	
6	Jl. Situ Gede	1,023	24	2	0,065
7	Jl. Bojong Limus II	0,368	6	1	
8	Jl. Bojong Limus I	0,297			
9	Jl. Bojong Limus III	0,123			
10	Jl. Cilingga	0,627	6	2	0,055
11	Jl. Maya Graha	0,442	1	2	
12	Jl. KH.EZ.Mutaqien	0,789	17	6	0,789
13	Jl. Mitra Batik	0,859	26	34	0,859
14	Jl. Gunung Sabeulah	0,267	11	9	0,767
15	Jl. Pasar Wetan	0,473	13	19	1,473
16	Jl. Veteran	0,468	5	20	0,968
17	Jl. Nagarawangi	0,432	14	10	
18	Jl. Paseh	1,996	55	15	0,085
19	Jl. Lukmanul Hakim	1,579	22	6	1,579
20	Jl. Terusan BCA	0,901	18	4	
21	Jl. Cipicung	0,765	17	3	
22	Jl. Pertanian	0,591	7		
23	Jl. Cilembang	1,540	14	5	
24	Jl. Cempaka Warna	0,636	11		
25	Jl. Babakan Selakaso	0,139	2		
26	Jl. Pasar Rel	0,485	6	1	
27	Jl. Pasar Kidul	0,311	2		
28	Jl. Pasar Baru I	0,280	1		
29	Jl. Pasar Baru II	0,164		2	
30	Jl. Sukalaya Barat	0,491	4	5	
31	Jl. Argasari	0,283	16	1	
32	Jl. Cieunteung	0,863	9	5	0,863
33	Jl. Bantar	1,997	32	18	3,997
34	Jl. Pesantren AL Misbah I	0,390	4		
35	Jl. Pesantren AL Misbah II	0,241			
36	Jl. Cieunteung Gede	0,575	14	2	
37	Jl. Sindang Jaya	0,384	5	3	
38	Jl. Argasari I	0,690	9		
39	Jl. Bebedilan	0,240	5	1	0,240
40	Jl. R.E. Jaelani	1,201	7	1	1,201
41	Jl. Jiwa Besar	0,498	11	1	
42	Jl. Cihideung Balong	0,389	2	4	0,389

43	Jl. Margaluyu	0,274	4	1	0,274
44	Jl. Cibaregbeg	0,498	13	1	
45	Jl. ABR	0,460	3	2	
46	Jl. Sangkali	0,265	4	1	
47	Jl. Maniis	1,274	4		
48	Jl. Tundagan	1,341	21	1	
49	Jl. Lewo Babakan	1,205	13	1	
50	Jl. Bantarsari - Gn. Goong	4,954	6		
51	Jl. Gn. Tangkil	0,876	6		
52	Jl. Gn. Nangka	1,858	10		
53	Jl. Gn. Bubut	1,304	5		
54	Jl. Rancasenggang	1,716	3		
55	Jl. Cibuni Geulis II	0,702	4		
56	Jl. Cibuni Geulis III	0,223	5		
57	Jl. Gandok I	0,970	5		
58	Jl. Leuwikidang	1,897	25		
59	Jl. Gn Cihcir I	0,256	4		
60	Jl. Gn Cihcir II	1,090	2		
61	Jl. Panyamanan Depok	1,069	2		
62	Jl. Leuwimalang	1,165	6		
63	Jl. Bantargedang	0,249	9		
64	Jl. Rancabango	0,534	16		
65	Jl. Terusan Cimuncang	0,155		1	
66	Jl. Sukamulya I	0,493	7		
67	Jl. Sukamulya II	0,634	4		
68	Jl. Cimuncang	0,488	6	2	0,488
69	Jl. Sukamulya III	0,652	5		
70	Jl. Cijolang	1,275	7		
71	Jl. Cihurip I	0,527	4		
72	Jl. Cihurip II	0,454	1		
73	Jl. Sukarindik II	0,764	12	2	
74	Jl. Sukasari	1,348	5		
75	Jl. Leuwihieum	3,423	7		
76	Jl. Sukarindik Bungursari	1,455	3		
77	Jl. Cipeuteuy-Cinangsi-Cihideung	2,367	4		
78	Jl. Bungursari Cipeuteuy	0,807	4		
79	Jl. Babakan	1,058	2		
80	Jl. Bungursari	1,287	8		
81	Jl. Ranca Sepat	0,809	4		
82	Jl. Ranjeng	1,544	5		
83	Jl. Gandok II	1,421	6		
84	Jl. Rancageneng I	0,533	5		
85	Jl. Rancageneng II	0,771	4		
86	Jl. Pasir Angin	1,069	3		
87	Jl. Gandok-Pasir Angin	0,596	4		
88	Jl. Sukarindik III	0,814	5		
89	Jl. Cikondang	1,666	4		
90	Jl. Pasar Indihiang	0,665	3		
91	Jl. Sampang Tanjung	1,867	11		
92	Jl. Sukaratu	1,638	15	2	
93	Jl. Sukajaya Nangerok	0,269	8		
94	Jl. Sindanghayu	0,490	5		
95	Jl. Babakan Jawa - Gn Manggu	1,811	3		
96	Jl. Bojongkupa	1,473	8		
97	Jl. Cibungkul	0,913	6		
98	Jl. Bojong Kupa - Cibungkul	0,766	3		
99	Jl. Parakan Honje	0,796	10	1	
100	Jl. Mang Koko (Sindangpalay)	0,600	5		
101	Jl. Cirapih	1,016	5		
102	Jl. Sukarindik	1,250	4		
103	Jl. Liung Gunung	0,379	4		
104	Jl. Pamijahan	0,733	12		

105	Jl. Setiarasa	0,748	2	1	
106	Jl. Letda Lili Rochli	0,928	13	2	
107	Jl. Bojong Kaler	0,517	3		
108	Jl. Panunggal	0,174	6		
109	Jl. Bojong Kaum	0,391	3	2	
110	Jl. H. Ma'mun Sodik	0,659	9	1	
111	Jl. Bojong Tengah	0,339	5	2	
112	Jl. KH. Muhammad Suja'i	0,672	6	1	
113	Jl. Gudang Pasantren	0,208	2	2	
114	Jl. Ampera	1,813	16	2	1,813
115	Jl. Dinding Ari Raya	0,765	16	1	0,765
116	Jl. Mancagar	1,039	7		
117	Jl. Sukalaya III	0,255	3	2	
118	Jl. Sukalaya II	0,242	1		
119	Jl. Sukalaya I	0,245	1	1	
120	Jl. A.J. Witono	0,783	11		
121	Jl. Pasar Cikurubuk	0,501	10	3	
122	Jl. Panututan	0,637	16		
123	Jl. Bbk Payung III	0,191	4		
124	Jl. Bbk Payung II	0,179	4	2	
125	Jl. Bbk Payung I	0,262	6		
126	Jl. Gudang Jero I	0,246	3	1	
127	Jl. Gudang Jero II	0,320	4	3	
128	Jl. Gudang Jero III	0,289	2		
129	Jl. Cipedes I	0,422	6	6	
130	Jl. Cipedes II	0,375	5	2	
131	Jl. Paledang	0,145	4	2	
132	Jl. Leuwidahu	2,078	26	1	2,078
133	Jl. Cinehel	1,930	13	3	1,930
134	Jl. Sirnagalih	2,543	33	2	
135	Jl. Salamnunggal	1,066	10	1	
136	Jl. Pasanggrahan	0,985	8	1	
137	Jl. Cipapagan	0,580	4		
138	Jl. Indihiang - Batas Kota	0,331	23	6	0,331
139	Jl. Tajur	1,765	11		
140	Jl. Leuwibudah	0,675	9		
141	Jl. Cibunigeulis	1,739	3	1	1,739
142	Jl. Situ Beet	1,640	4	1	
143	Jl. Indihiang - Mangkubumi	6,814	159	20	6,814
144	Jl. Siliwangi	2,951	30	39	2,951
145	Jl. Cilolohan	0,897	9	3	0,897
146	Jl. K.H. Zaenal Mustofa	2,539	80	34	2,539
147	Jl. Sule Setianegara	1,520	28	3	
148	Jl. Babakan Siliwangi	0,797	7	2	
149	Jl. Cikalang Girang	0,475	10	4	0,475
150	Jl. Cikalang Tengah	0,450	8	5	0,450
151	Jl. Yayasan Taman Harapan	0,524	4	2	
152	Jl. BKR	1,465	13	5	1,465
153	Jl. Asrama Nyantong	1,271	15	3	
154	Jl. Ibu Apipah	0,455	5	3	0,455
155	Jl. Dadaha	0,912	11	5	0,912
156	Jl. Laswi	0,662	7	3	0,662
157	Jl. Tentara Pelajar	1,147	12	28	1147
158	Jl. Panyerutan	0,246	6	7	0,246
159	Jl. Rumah Sakit Umum	0,495	8	19	0,495
160	Jl. Sapta Marga	0,587	6	7	0,587
161	Jl. Kol. Abdullah Saleh	0,649	12	6	0,649
162	Jl. Garuda	0,645	1	6	0,645
163	Jl. Selakaso	0,367	7	6	0,367
164	Jl. Pataruman	0,312	3	5	0,312
165	Jl. Empang Sari	0,353	4	2	
166	Jl. Taman Makam Pahlawan	0,639	6	2	

167	Jl. Empang	0,392	8	4	0,392
168	Jl. Komarasari I	0,160	3	1	
169	Jl. Komarasari II	0,287	4	2	
170	Jl. Komarasari III	0,072	2	1	
171	Jl. Kantoran	0,090		2	
172	Jl. Pegadaian	0,089	3	2	0,089
173	Jl. Listrik	0,088	1	1	
174	Jl. Mayor Utarya	0,372	7	7	0,372
175	Jl. Pemuda	0,332	8	6	0,332
176	Jl. Otto Iskandardinata	0,441	8	23	0,441
177	Jl. Cihideung	0,366	6	7	0,366
178	Jl. Sukawarni	0,429	8	5	
179	Jl. Yudanegara	0,551	16	4	0,551
180	Jl. Seladarma	0,535	6	2	
181	Jl. Yuda Dharma	0,134	-	-	
182	Jl. Panyingkiran	0,222	4	1	
183	Jl. Mesjid Agung	0,142	3	5	0,142
184	Jl. R. Ikik Wiradikarta	0,362	5	5	0,362
185	Jl. Tawangsari	0,269	7	4	0,269
186	Jl. Kajaksan	0,148		2	
187	Jl. Ciromban	0,149	1	2	
188	Jl. Kamasan	0,150		2	
189	Jl. Galunggung	0,659	17	19	0,659
190	Jl. Pendopo	0,192	4	4	
191	Jl. Tarumanegara	0,456	8	14	0,456
192	Jl. Manglid	0,114		1	
193	Jl. Pasundan	0,160	3	1	
194	Jl. Dewi Sartika	0,321	2	5	0,321
195	Jl. RAA Wiratanuningrat	0,490	10	13	0,490
196	Jl. Pabrik Es	0,123	2	1	
197	Jl. Kapt. Didi Effendi	0,125	3	1	
198	Jl. Kehutanan	0,287	3	1	
199	Jl. Rumah Sakit I	0,376	-	-	
200	Jl. Tanuwijaya	0,232	7	14	0,232
201	Jl. Kebon Tiwu I	0,280	4	1	
202	Jl. Kebon Tiwu II	0,093	2	1	
203	Jl. Kebon Tiwu III	0,246	2		
204	Jl. Benda	0,780	12	2	0,780
205	Jl. Sutisna Senjaya	1,655	13	10	1655
206	Jl. Condong-Purbaratu	2,050	11	2	
207	Jl. Cihaji Kidul	1,046	2		
208	Jl. Saripin - Tanjungsari	1,222	12		
209	Jl. Sindangkasih	1,673	7	1	
210	Jl. Bebedahan	2,008	14	3	
211	Jl. Bj Nangka- Purbaratu	1,627	11		
212	Jl. Bj Nangka- Depok	0,903	8		
213	Jl. Depok - Purbaratu	1,430	14		
214	Jl. Sindangmulih	0,441	6		
215	Jl. Benteng - Golempang (Sukajaya)	2,639	6		
216	Jl. Cibodas Tengah	0,368	5		
217	Jl. Cibodas	0,452	4		
218	Jl. Ciwasmandi	1,175	11		
219	Jl. Singkup - Gobang	5,457	10		
220	Jl. Legoksari - Cisitu	1,473	3		
221	Jl. Margabakti - Jurey	1,985	5		
222	Jl. Tb. Abdullah	2,633	10		
223	Jl. Bebedahan II	0,674	9		
224	Jl. SKP	0,488	5		
225	Jl. Gunung Sari	0,254	4		
226	Jl. Margasari	0,232	3		
227	Jl. Sukasari	0,198	4		
228	Jl. Cendrawasih	0,391	2		

229	Jl. Sukagalih	0,397	2		
230	Jl. Pasar Pancasila	0,231	14	7	0,231
231	Jl. Pancasila	0,550	8	4	0,550
232	Jl. Merdeka	0,384	4	2	0,384
233	Jl. Letkol. Komir Kartaman	0,722	7	7	0,722
234	Jl. Padasuka	0,893	6	8	
235	Jl. Kebangsaan	0,232	7	4	
236	Jl. Stasion	0,390	8	2	0,390
237	Jl. Jajaway Kecil	0,171	4	2	
238	Jl. Rasamala	0,165	3	2	
239	Jl. Cimulu	0,344	6	8	0,344
240	Jl. DR. Sukarjo	0,734	15	23	0,734
241	Jl. Kapt. Naseh	0,686	6	5	0,686
242	Jl. Panglayungan II	0,228		1	
243	Jl. Panglayungan III	0,158		1	
244	Jl. Buninagara I	0,435	12	2	
245	Jl. Burujul II	0,128	5	2	
246	Jl. Burujul I	0,351	3	1	
247	Jl. Kalangsari	0,269	5	2	
248	Jl. Leuwianyar	1,920	42	2	
249	Jl. Cikanyere	1,381	18	1	
250	Jl. A. Yani	1,553	22	17	1,553
251	Jl. Dudi Duriatman	0,906	3		
252	Jl. Cibogor-Benda-Cigeureung	2,591	10	1	2,591
253	Jl. Parakannyasag I	0,363	6	1	
254	Jl. Kadupugur-Tonjong	0,614	6	1	
255	Jl. Buninagara II	0,268	3		
256	Jl. Buninagara III	0,719	5		
257	Jl. Burujul III	0,593	5	1	
258	Jl. Mayor Elang Subandar	0,788	10	5	0,788
259	Jl. Kol. H. Utuy Subandi	0,904	12	2	0,904
260	Jl. Nusa Indah Raya	0,659	12	3	0,659
261	Jl. Salamnunggal-Mumunggang	1,482	6	1	
262	Jl. Perum Bumi Resik Indah	1,260	7	1	
263	Jl. Cikunten Indah	0,635	7	1	
264	Jl. Peta	1,437	12	4	1,437
265	Jl. Perum Batara	0,438	5	1	0,438
266	Jl. Noenoeng Tisnasapoetra	1,851	7	2	1,851
267	Jl. Nagara Kasih I	0,858	6		
268	Jl. Nagara Kasih II	0,442	4		
269	Jl. Nagara Kasih III	0,770	2		
270	Jl. Sukanegara I	1,187	4		
271	Jl. Sukanegara II	0,667	4		
272	Jl. Awipari	1,571	22	4	1,571
273	Jl. Aksajaya	0,533	6	1	0,533
274	Jl. Cisumur	0,698	9	4	0,698
275	Jl. Babakan Tengah	0,690	3		
276	Jl. Rancamaya	1,128	7		
277	Jl. Cicantel	1,201	12		
278	Jl. Sukamaju	0,637	6		
279	Jl. Mulyasari	1,263	14		
280	Jl. Cicariang - Setiamulya (Bong)	2,907	14		
281	Jl. Tanjungsari	1,103	12		
282	Jl. Sengkol	0,773	8		
283	Jl. Setiamulya - Simpang Selakaso	2,961	12		
284	Jl. Tamansari	4,249	21	2	
285	Jl. Panunggulan	0,566	4		
286	Jl. Ciwaas Depok	1,488	5		
287	Jl. Ciharashas - Sukawening	1,896	7		
288	Jl. Sumelap	1,548	4		
289	Jl. Mugarsari	0,927	4		
290	Jl. Cilendek	2,963	12		

291	Jl. Bantargedang - Cilendek	1,193	12		
292	Jl. Ciakar	2,885	9		
293	Jl. Ciakar - Nangela	0,770	7		
294	Jl. Nangela - Ciangir	1,039	7		
295	Jl. Ciangir	1,891	6		
296	Jl. Simpang Selakaso - Cigaru	1,991	6		
297	Jl. Cigaru - Cidolog	3,251	13		
298	Jl. Setiawargi - Cidolog	2,738	8		
299	Jl. Setiamulya - Setiawargi	4,664	8		
300	Jl. Cikaret	2,280	7		
301	Jl. Cigunder	1,700	4		
302	Jl. Cidahu - Malingping	3,756	7		
303	Jl. Gn. Putri - Sukajaya	5,240	14		
304	Jl. Cisapi	1,332	4		
305	Jl. Cicau	1,647	4		
306	Jl. Cicau - Sukajaya I	0,907	4		
307	Jl. Pasir Tengah	2,149	5		
308	Jl. Cianjur Kidul	2,184	6		
309	Jl. Ciburuyan - Pagaden	1,457	5		
310	Jl. Tapal Batas - Gn. Tanjung	0,744	5		
311	Jl. Cidolog - Batas Kota	0,927	5		
312	Jl. Perum Kotabaru	1,317	14		
313	Jl. Bantargedang	0,607	8		
314	Jl. Kersanegara	1,774	7		
315	Jl. Cikatuncar	0,213	6		
316	Jl. Letjen. Mashudi - Rajawali	0,067	8	2	0,067
317	Jl. Rajawali- Negla	0,902	8		
318	Jl. Rajawali	2,728	13		
319	Jl. Bantargedang - Sukasukur	0,963	4		
320	Jl. Rajawali - Sukasukur	0,690	5		
321	Jl. Situhiang	1,963	6		
322	Jl. Cibanqun	2,800	5		
323	Jl. Semprang	0,586	2		
324	Jl. Rahayu I	0,352	5		
325	Jl. Rahayu II	0,562	6		
326	Jl. Sukahurip	0,345	7		
327	Jl. Negla Kidul	0,477	5		
328	Jl. Sarongge	0,821			
329	Jl. Ciakar - Margabakti	2,252	8		
330	Jl. Malingping - Cigaru	1,520	2		
331	Jl. Sambong PLN	1,140	7		
332	Jl. Sambong Jaya	0,922	14		
333	Jl. Babakan Tempe	0,851	3		
334	Jl. Kopo - Cibeber	1,019	4		
335	Jl. Wijaya Praja	0,891	5		
336	Jl. Saguling (Babakan Pala)	1,854	10		
337	Jl. Sewaka Babakan Kadu	1,625	6	1	1,625
338	Jl. Gargadung	0,500	2		
339	Jl. Sambong Asih	0,855	2		
340	Jl. Gunung Subang	0,795	4		
341	Jl. Saguling Panjang	0,319	2		
342	Jl. Genteng	1,029	6		
343	Jl. Saguling Babakan	1,140	9		
344	Jl. Tonjong II	1,209	3		
345	Jl. Cicariang - Lewimida	2,429	9		
346	Jl. Cibeuti	0,681	11		
347	Jl. Bajigur Bahe	0,354	5		
348	Jl. Air Tanjung	5,613	13		
349	Jl. Leuwiliang - Bagogog	2,679	5		
350	Jl. Air Tanjung - Cikadu	1,263	4		
351	Jl. Sukapala	1,395	6		
352	Jl. Ciwangsa - Peundeuy	1,782	4		

353	<i>Jl. Air Tanjung - Cibeurih</i>	1,199	4		
354	<i>Jl. Rancabogo</i>	0,566	8		
355	<i>Jl. Cijeruk Hilir</i>	1,264	5		
356	<i>Jl. Asta</i>	1,502	5		
357	<i>Jl. Karanganyar</i>	2,334	9		
358	<i>Jl. Sukasirna - Cisalam</i>	1,729	5		
359	<i>Jl. Rancamacan - Cisalam</i>	1,943	6		
360	<i>Jl. Cilangge</i>	0,383	1		
361	<i>Jl. Cikalamas</i>	1,399	4		
362	<i>Jl. Tambir - Cijeruk</i>	0,764	4		
363	<i>Jl. Cijeruk Girang</i>	0,576	6		
364	<i>Jl. Cihonje</i>	1,239	4		
365	<i>Jl. Sudimara</i>	0,796	4		
366	<i>Jl. Munjul I</i>	0,558	3		
367	<i>Jl. Cibanjuran - Karikil</i>	2,132	9	5	2,132
368	<i>Jl. Mangkubumi - Karikil</i>	2,172	13	4	2,172
369	<i>Jl. Perbu</i>	0,589	5	2	0,589
370	<i>Jl. Cigantang</i>	0,748	5		
371	<i>Jl. Cigantang Kidul</i>	0,731	3		
372	<i>Jl. Liung Gunung</i>	1,648	5		
373	<i>Jl. Kereteg</i>	1,890	2		
374	<i>Jl. Gunungsari</i>	0,831	2		
375	<i>Jl. Perintis Kemerdekaan</i>	2,104	42	19	2,104
376	<i>Jl. Picung Remuk</i>	1,290	3		
377	<i>Jl. Pagaden - Cianjur</i>	0,529	3		
378	<i>Jl. Cijambe</i>	3,142	2		
379	<i>Jl. Urug-Cikatomas</i>	1,042	18	2	1,042
380	<i>Jl. Peundeuy - Nangela</i>	2,927	5		
381	<i>Jl. Cijeruk - Cijerah</i>	1,298	5		
382	<i>Jl. Cijerah</i>	0,874	4		
383	<i>Jl. Nyalindung</i>	0,543	4		
384	<i>Jl. Sambong Asem</i>	0,520	3		
385	<i>Jl. Cikunir</i>	1,321	8	2	1,321
386	<i>Jl. Sindangsari</i>	2,253	13		
387	<i>Jl. Cibangbay</i>	3,316	9		
388	<i>Jl. Lingkar Terminal</i>	1,750	21	7	1,750
389	<i>Jl. Ir. Djuanda</i>	1,150	145	71	1,150
390	<i>Jl. Cibuyut</i>	0,850	9		
391	<i>Jl. Cigantung</i>	0,270	2		
392	<i>Jl. Lewidahu Kaler</i>	0,550	3		
393	<i>Jl. Cikadu - Rancabeureum</i>	1,000	4		
394	<i>Jl. Rancakukun</i>	0,850	2		
395	<i>Jl. Bungur Pondok Tandala I</i>	0,060	-	1	
396	<i>Jl. Bungur Pondok Tandala II</i>	0,080	-	1	
397	<i>Jl. Taruna</i>	0,850	-	1	
398	<i>Jl. Kemuning</i>	0,300	3		
399	<i>Jl. Lingkar - Cipeusar</i>	0,770	2		
400	<i>Jl. Talagasari - Air Tanjung</i>	0,150	6		
401	<i>Jl. Gn. Kokosan</i>	2,100	2		
402	<i>Jl. KH. Ahmazi</i>	0,350			
403	<i>Jl. Awipari Nurulhuda</i>	0,260	3		
404	<i>Jl. Pedati - Ciakar</i>	1,500	6		
405	<i>Jl. Ciroyom</i>	0,450	6		
406	<i>Jl. Cikoneng I</i>	0,350	4		
407	<i>Jl. Cikoneng II</i>	0,700	2		
408	<i>Jl. Bugelan - Gn. Tandala</i>	0,850	5		
409	<i>Jl. Pangkalan I</i>	0,230	7		
410	<i>Jl. Rancabeureum-Leuwiliang</i>	3,300	2		
411	<i>Jl. Urug lapang</i>	0,900	2		
412	<i>Jl. Cikaraha</i>	2,500	1		
413	<i>Jl. Bantarhuni</i>	0,750	1		
414	<i>Jl. Cipajaran</i>	2,000	2		

415	Jl. Cidarendeng - Cibinong	2,500	1		
416	Jl. Lingkar Dadaha	0,500	28	4	0,500
417	Jl. Abimayu	0,114		1	
418	Jl. Abiyasa	0,156		1	
419	Jl. Antareja	0,095	1	1	
420	Jl. Antasena	0,082		1	
421	Jl. Arjuna	0,133	1	1	
422	Jl. Babakan	0,420		1	
423	Jl. Baladewa	0,062	1	1	
424	Jl. Bima	0,157	1	1	
425	Jl. Bisma	0,071	1	1	
426	Jl. Blok B	0,085		1	
427	Jl. Blok C	0,084		1	
428	Jl. Blok D	0,052		1	
429	Jl. Blok E	0,081		1	
430	Jl. Blok F	0,127		1	
431	Jl. Blok J	0,142		1	
432	Jl. Blok K	0,088		1	
433	Jl. Cindramata	0,232		1	
434	Jl. Cindramata I	0,036		1	
435	Jl. Cisuta Sindang Hurip	0,372	2	1	
436	Jl. Damar I	0,131		1	
437	Jl. Damar II	0,151		1	
438	Jl. Damar III	0,145		1	
439	Jl. Damar IV	0,242		1	
440	Jl. Damar V	0,045		1	
441	Jl. Damar VII	0,544		1	
442	Jl. Damar VIII	0,283		1	
443	Jl. Dinding Ariraya I	0,165	3	1	
444	Jl. Dinding Ariraya II	0,139	2	1	
445	Jl. Anggrek I	0,214		1	
446	Jl. Anggrek II	0,123		1	
447	Jl. Anggrek III	0,156		1	
448	Jl. Anggrek IV	0,121		1	
449	Jl. Flamboyan I	0,137	1	1	
450	Jl. Flamboyan II	0,192		1	
451	Jl. Flamboyan III	0,148		1	
452	Jl. Flamboyan IV	0,074		1	
453	Jl. Flamboyan V	0,074		1	
454	Jl. Flamboyan VI	0,029		1	
455	Jl. Flamboyan VIII	0,037		1	
456	Jl. Gerbang	0,047		1	
457	Jl. Mawar I	0,074		1	
458	Jl. Mawar II	0,072	1	1	
459	Jl. Mawar III	0,074	1	1	
460	Jl. Mawar IV	0,103		1	
461	Jl. Mawar V	0,103		1	
462	Jl. Mawar VI	0,055		1	
463	Jl. Mawar VII	0,087		1	
464	Jl. Melati I	0,072		1	
465	Jl. Melati II	0,121		1	
466	Jl. Melati III	0,081		1	
467	Jl. Melati IV	0,227		1	
468	Jl. Melati V	0,172		1	
469	Jl. Nusa Indah I	0,331		1	
470	Jl. Teratai I	0,074		1	
471	Jl. Teratai II	0,118		1	
472	Jl. Teratai III	0,064		1	
473	Jl. Teratai IV	0,062		1	
474	Jl. Teratai V	0,324		1	
475	Jl. Gn. Bentang	0,228	1	1	
476	Jl. Gn. Bentang I	0,049		1	

477	Jl. Gn. Bentang II	0,080	1	1	
478	Jl. Gn. Bentang III	0,078		1	
479	Jl. Gn. Bitung	0,122		1	
480	Jl. Gn. Goong	0,065		1	
481	Jl. Gn. Guntur	0,135		1	
482	Jl. Gn. Guntur I	0,105		1	
483	Jl. Gn. Guntur II	0,120		1	
484	Jl. Gn. Guntur III	0,069		1	
485	Jl. Gn. Kelir	0,057		1	
486	Jl. Gn. Kondang	0,138		1	
487	Jl. Gn. Kondang I	0,073		1	
488	Jl. Gn. Kondang II	0,070		1	
489	Jl. Gn. Kondang III	0,600		1	
490	Jl. Gn. Kukus	0,083		1	
491	Jl. Gn. Lenggang	0,221	1	1	
492	Jl. Gn. Lenggang I	0,097		1	
493	Jl. Gn. Lenggang II	0,084		1	
494	Jl. Gn. Lenggang III	0,060		1	
495	Jl. Gn. Lenggang IV	0,053		1	
496	Jl. Gn. Lenggang V	0,118		1	
497	Jl. Gn. Walang	0,102		1	
498	Jl. Hanoman	0,114		1	
499	Jl. Kajaksan	0,961		1	
500	Jl. Kajaksan	0,147	1	1	
501	Jl. Komarasari III	0,071	1	1	
502	Jl. Kresna	0,045		1	
503	Jl. Kumbakarna	0,108		1	
504	Jl. Laswi Residen Raya	0,032	12	2	
505	Jl. Layung Sari	0,158		1	
506	Jl. Manangga	0,653		1	
507	Jl. Mangkoko - Pasantren	0,351	2	1	
508	Jl. Margasari	0,232	2	2	
509	Jl. Mega Asri	0,149	4	1	
510	Jl. Mega Asri	0,064	4	1	
511	Jl. Mega Asri I	0,084		1	
512	Jl. Mega Asri I	0,064		1	
513	Jl. Mega Asri II	0,142		1	
514	Jl. Mega Asri III	0,233		1	
515	Jl. Mega Asri IV	0,559	1	1	
516	Jl. Mega Asri IV	0,267		1	
517	Jl. Mega Asri IX	0,098		1	
518	Jl. Mega Asri IX	0,078		1	
519	Jl. Mega Asri V	0,164		1	
520	Jl. Mega Asri VI	0,241		1	
521	Jl. Mega Asri VII	0,155	1	1	
522	Jl. Mega Asri VIII	0,221	1	1	
523	Jl. Mega Asri VIII	0,019		1	
524	Jl. Mega Asri X	0,073		1	
525	Jl. Mutiara	0,246		1	
526	Jl. Nagrog	0,963		1	
527	Jl. Nakula	0,217		1	
528	Jl. Nusa Indah II	0,383		1	
529	Jl. Palasara	0,056		1	
530	Jl. Pandu	0,104		1	
531	Jl. Parahyangan Raya	0,608		1	
532	Jl. Pegadaian	0,089	2	1	
533	Jl. Prajamukti	0,243		1	
534	Jl. Prajamukti I	0,209		1	
535	Jl. Purbaraya	0,073		1	
536	Jl. Rancabendem	0,555	1	1	
537	Jl. Raya Intan	0,405	6	1	
538	Jl. Rubby	0,211	3	1	

539	Jl. Rubby 1	0,364	3	1	
540	Jl. Rubby 4	0,210	1	1	
541	Jl. Sadewa	0,276		1	
542	Jl. Samiaji	0,019		1	
543	Jl. Sariaji	0,122		1	
544	Jl. Semar	0,136		1	
545	Jl. Sindang Wargi	0,175		1	
546	Jl. Sukarame	0,842		1	
547	Jl. Sukaresi	0,062		1	
548	Jl. Sukasirna	0,174		1	
549	Jl. Suyadana	0,049		1	
550	Jl. Talaga Bodas	0,112	1	1	
551	Jl. Talaga Bodas II	0,072	2	1	
552	Jl. Talaga Bodas III	0,256		1	
553	Jl. Talaga Bodas III	0,087	1	1	
554	Jl. Terusan Nakula	0,048		1	
555	Jl. Wibisama	0,158		1	
556	Jl. Yuda Darma	0,134	1	1	
557	Jl. Zamrud 1	0,196		1	
558	Jl. Zamrud 2	0,313		1	
559	Jl. Zamrud 3	0,203	1	1	
560	Jl. Zamrud 4	0,221	1	1	
	Total	450,742			

(Daftar ruas jalan berdasarkan SK.541.3/Kep.136-DIPUPR/2017), Sumber : Seksi Fasilitas Lalu Lintas, tahun 2021

Adanya perubahan RPJMD yang ditindaklanjuti dengan perubahan renstra 2017-2022 pada tahun 2020, maka pada pelaksanaan urusan pemerintahan umum, yang menjadi ukuran kinerja perangkat daerah adalah capaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun capain untuk indikator tersebut adalah :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum
Periode Renstra Tahun 2017-2022

No	Indikator	Capaian Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Capaian IKM	77,01 (B)	78,01 (B)	81,90 (B)	78,00 (B)
2	Capaian SAKIP	77,44 (BB)	80,08 (A)	82,22 (A)	82,59 (A)

Sumber : Subag PEP dan Keuangan, tahun 2021

Nilai capaian sebelum pelaksanaan target tahunan renstra 2017-2018 yaitu tahun 2017, capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk IKM adalah 63,76 dan SAKIP 61,62 (B).

Dilihat dari tabel di atas, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hal ini menunjukkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terus meningkat. Capaian kinerja yang diperoleh selama 4 (empat) tahun masa renstra 2017-2022 dengan menggunakan data capaian sebelumnya yaitu tahun 2017 bahwa Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat sebesar 14,28 point. Walau pada tahun 2020 sempat mendapatkan nilai tertinggi yaitu 80,90 (B) dan turun menjadi 78,00 (B) di tahun 2021. Faktor penyebab menurunnya nilai capaian IKM tersebut banyak disebabkan karena adanya pandemic covid-19 dimana disektor transportasi banyak terdampak dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengendalian penyebaran covid-19 sehingga persepsi yang timbul waktu pelaksanaan survey dilaksanakan memberikan tanggapan yang cenderung kurang puas sehingga dapat melemahkan nilai hasil survey.

Disisi lain, capaian SAKIP terus mengalami peningkatan. Capaian kinerja yang diperoleh selama 4 (empat) tahun masa renstra 2017-2022 dengan menggunakan data capaian sebelumnya yaitu tahun 2017 dengan nilai SAKIP 56,31, bahwa SAKIP meningkat sebesar 21,13 point pada tahun 2018 dan merupakan peroleh point terbesar yang terjadi pada masa renstra 2017-2022. Terakhir capaian nilai SAKIP yaitu tahun 2021 adalah 82,59 (A) atau naik 26,28 point dari nilai awal tahun 2017.

Dalam masa periode pelaksanaan renstra tahun 2017-2022, terdapat pengendalian kebijakan penyusunan renstra antara lain dilakukan reuiu renstra 2017-2022 pada tahun 2019 dengan adanya perubahan peraturan yang mendasari penetapan indikator tujuan yang semula menggunakan berdasarkan

Pemenuhan Nomor 14 Tahun 2006 dirubah menjadi Berdasarkan Permenhub Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Selanjutnya pada tahun 2020 adanya perubahan renstra tahun 2017-2022 dengan latar belakang perubahan dimaksud yaitu :

1. Adanya perubahan Kebijakan Perencanaan Nasional, antara lain dengan terbitnya Perpres No 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2019-2024, Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 2019-2024;
2. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah antara lain dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No 70/2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah);
3. Adanya perubahan Kebijakan Daerah Propinsi Jawa Barat antara lain dengan terbitnya Perda No.8/2019 tentang RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
4. Hasil Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
5. Perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
6. Peraturan lainnya dan perubahan kebijakan nasional lainnya.

Terakhir pada tahun 2021, pengendalian kebijakan penyusunan renstra tahun 2017-2022 dilakukan reuiu renstra 2017-2022 dengan hal yang melatarbelakanginya adalah :

1. Adanya perubahan terkait dasar hukum Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam dokumen renstra (perubahan) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
2. Adanya perubahan target Capaian SAKIP perangkat daerah untuk tahun 2022 yang semula dalam dokumen renstra (perubahan) adalah 81,25 (A) menjadi 82,75 (A);

3. Adanya perubahan target Capaian hasil survey kepuasan masyarakat untuk tahun 2022 yang semula dalam dokumen renstra (perubahan) adalah 77-88 (Baik) menjadi 79 (Baik).

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

2.7.1 Tantangan / Threat (Ancaman)

Kota Tasikmalaya terletak antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari Propinsi Jawa Barat yang saling berinteraksi dan berintegrasi. Sistem transportasi di Kota Tasikmalaya merupakan bagian dari sistem transportasi regional dan nasional, dimana dalam penyelenggaraan transportasi di Kota Tasikmalaya tidak bisa lepas dari daerah/kota-kota lain disekitarnya.

Perkembangan bidang perhubungan di Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama dapat dilihat dari volume lalu lintas yang menggunakan ruas-ruas jalan yang ada di Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu perlu diantisipasi jauh ke depan agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat berjalan dengan selamat, aman, lancar dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang menuntut kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu mengimbangi kemajuan dan perkembangan zaman.

Hambatan yang menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya saat ini dan kedepan berasal dari luar dan dalam organisasi serta keterbatasan kewenangan yang dimiliki organisasi. Adapun hambatan tersebut antara lain :

- 1) Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas;
- 2) Berkembangnya kendaraan yang dijadikan angkutan umum berbasis aplikasi;
- 3) Belum seimbangny kapasitas jalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun;
- 4) Belum adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai batasan umur layak pakai kendaraan;

- 5) Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan;
- 6) Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- 7) Perlengkapan jalan masih kurang;
- 8) Sarana dan prasarana angkutan orang dan angkutan barang yang belum memadai;
- 9) Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik;
- 10) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang perhubungan masih terbatas.

2.7.2 Peluang

Peluang untuk mengurangi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya. Peluang yang ada saat ini diantaranya:

- 1) Terdapat beberapa alternatif lokasi / bangunan yang dapat dijadikan kantong parkir di pusat kota;
- 2) Perkembangan wilayah Kota Tasikmalaya yang cukup pesat, dapat menjadi peluang meningkatkan PAD dari sektor perhubungan;
- 3) Keberadaan bandara Wiriadinata. Keberadaan yang dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi dari dan ke Kota Tasikmalaya;
- 4) Adanya perhatian yang cukup tinggi dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan bandara Wiriadinata;
- 5) Adanya kebijakan baru terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pemerintahan kabupaten/kota yang dapat menjawab tantangan dari dinamika perkembangan teknologi dan informasi serta tuntutan kebutuhan masyarakat;
- 6) Adanya kebijakan dana bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Barat di bidang perhubungan;
- 7) Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan.

2.7.3 Kekuatan (Strength) :

- 1) Adanya dukungan regulasi yang berlaku;
- 2) Tingkat kinerja pegawai yang ada;
- 3) Komitmen pimpinan.

2.7.4 Kelemahan (Weaknesses) :

- 1) Masih kurangnya sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga;
- 2) Masih kurangnya proporsi pegawai yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- 3) Belum optimalnya sistem informasi perhubungan yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Identifikasi faktor internal dan eksternal berdasarkan analisis SWOT digambarkan sebagaimana gambar berikut :

I N T E R N A L	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan regulasi yang berlaku; 2. Tingkat kinerja pegawai yang ada; 3. Komitmen pimpinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga; 2. Masih kurangnya proporsi pegawai yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi; 3. Belum optimalnya sistem informasi perhubungan yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.
E K S T E R N A L	Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa alternatif lokasi / bangunan yang dapat dijadikan kantong parkir di pusat kota; 2. Perkembangan wilayah Kota Tasikmalaya yang cukup pesat, dapat menjadi peluang meningkatkan PAD dari sektor perhubungan; 3. Keberadaan bandara Wiriadinata. Keberadaan yang dapat meningkatkan aksesibilitas transportasi dari dan ke Kota Tasikmalaya; 4. Adanya perhatian yang cukup tinggi dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan bandara Wiriadinata; 5. Adanya kebijakan baru terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pemerintahan kabupaten/kota yang dapat menjawab tantangan dari dinamika perkembangan teknologi dan informasi serta tuntutan kebutuhan masyarakat; 6. Adanya kebijakan dana bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa Barat di bidang perhubungan; 7. Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas 2. Berkembangnya kendaraan yang dijadikan angkutan umum berbasis aplikasi; 3. Belum seimbangnnya kapasitas jalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun; 4. Belum adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai batasan umur layak pakai kendaraan; 5. Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan; 6. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas; 7. Perlengkapan jalan masih kurang; 8. Sarana dan prasarana angkutan orang dan angkutan barang yang belum memadai; 9. Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik; 10. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang perhubungan masih terbatas.

Gambar 4
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Berdasarkan Analisis SWOT

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi permasalahan kesekretariatan dan permasalahan yang ada di bidang atau yang menjadi urusan wajib perhubungan.

1. Permasalahan dikesekretariatan

Permasalahan yang ada di lingkup ini adalah keterbatasan pegawai yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan kurangnya peningkatan kapasitas pegawai melalui workshop/bimtek/diklat. Hal ini sangat diperlukan guna akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kualitas kerja yang diharapkan.

2. Permasalahan Pada Bidang

Permasalahan yang ada pada bidang atau permasalahan yang terkait pada urusan perhubungan meliputi beberapa aspek diantaranya sebagai berikut :

- a. Aspek Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya; Identifikasi dilakukan terhadap gambaran pelayanan dan kinerja dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.

- b. Aspek Kajian terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya; Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya
- c. Aspek Kajian terhadap pola tata ruang Kota Tasikmalaya/RTRW; Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.
- d. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS; Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang, analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarang dibandingkan dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan, faktor yang mempengaruhi dan permasalahan yang ada dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Baik	Capaian Renstra	SDM, Sarana dan Anggaran	Perda, Prasarana	Masih kurangnya sarpras pelayanan
Kajian terhadap RPD	Baik	Capaian Renstra	SDM, Sarana dan Anggaran	Perda	-
Kajian terhadap RTRW	Baik	Capaian Renstra	SDM, Sarana dan Anggaran	Perda, Prasarana yang ada	-
Kajian KHLS	Baik	Capaian Renstra	SDM, Sarana dan Anggaran	Peraturan Perundangan	-

3.2 Telaahan Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah salah satu perangkat daerah yang ada di Kota Tasikmalaya dan bertugas untuk melaksanakan program kerja daerah. Sebagai bagian dari perangkat yang melaksanakan program kerja daerah, untuk program kerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 merujuk kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 meliputi strategi, arah kebijakan dan program daerah.

Adapun strategi, arah kebijakan dan program daerah tahun 2023-2026, adalah :

Tabel 3.2
Arah Kebijakan dari Strategi Pembangunan
Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.1. Meningkatnya kesejahteraan sosial	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1. Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial, 2. Pemberdayaan masyarakat miskin, 3. Sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan	1. 1. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya. 2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya,
T.2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan berbasis teknologi informasi	1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar 2. Peningatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, 3. Peningkatan kurikulum/metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi
	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang	4. Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kesehatan	kesehatan
	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. 6. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	<ol style="list-style-type: none"> 7. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalan potensi pemuda dan olahraga. 8. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya
	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 9. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif, 10. Peningkatan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan
T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi, usaha dan industri mikro kecil. 2. Revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah 2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa. 3. Peningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah.</p> <p>4. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mendorong geliat sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</p> <p>5. Meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang untuk menjaga stabilitas inflasi daerah</p>	<p>pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah.</p> <p>4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.</p> <p>5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</p>
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	<p>1. Meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan pengendalian penanaman modal</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja</p>	<p>6. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan.</p> <p>7. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal.</p> <p>8. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja.</p> <p>9. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja</p>
T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	S9. Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	<p>1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi</p> <p>2. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</p>	<p>1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas.</p> <p>2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama ari minum dan air limbah yang layak.</p> <p>3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			permukiman layak huni yang nyaman dan sehat
	S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup. 2. enataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah
T.5. T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	S11. Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi infomasi serta Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai . 2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. 4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah

Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Masyarakat;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
4. Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;
5. Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah;
6. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib;
7. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
8. Meningkatkan iklim penanaman modal dan kesempatan kerja
9. Meningkatkan layanan infratraktur kota yang berkualitas
10. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
11. Meningkatkan kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;

Terkait hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana urusan perhubungan merupakan urusan daerah non pelayanan dasar, maka rencana pembangunan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 untuk menunjang tujuan, sasaran dan program daerah tahun 2023-2026 pada :

- Tujuan Daerah (T4) : Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan
- Sasaran Daerah (S9) : Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas
- Program Daerah (P9) : Meningkatkan layanan infratraktur kota yang berkualitas

Dengan strategi daerah di bidang perhubungan tahun 2023-2026 adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi. Dengan arah kebijakan yaitu peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas.

Selanjutnya, untuk urusan pemerintah umum arah pembangunan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 ditujukan untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan program daerah sebagai berikut :

- Tujuan Daerah (T5) : Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi
- Sasaran Daerah (S11) : Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi
- Program Daerah (P11) : Meningkatkan kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi

Dengan strategi daerah yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi informasi serta Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah, dengan kebijakan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai .

2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah
3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.
4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah

Telaahan terhadap tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun dari 2023-2026 dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Hasil identifikasi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah, ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2023-2026.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Tasikmalaya Terhadap Pencapaian Tujuan
dan Sasaran Daerah Tahun 2023-2026

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
T4	Tujuan : Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan			
S9	Sasaran : Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	Sinergitas perencanaan pembangunan antar perangkat daerah terkait masih belum optimal	Masih lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan antar stakeholder	Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan
T5	Tujuan : Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi			
S11	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi	Keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi	Ketersediaan anggaran dan kebijakan daerah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Adanya program bimtek/workshop / diklat di bidang perhubungan dari pemerintah pusat dan/atau lembaga lainnya

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Renstra Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Arah kebijakan presiden Joko Widodo untuk periode kepemimpinan kedua adalah : Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi, Mendorong Investasi dan Penggunaan APBN.

Yang menjadi fokus utama Kementerian Perhubungan Tahun 2019-2024 adalah Konektivitas dan Aksesibilitas, Tingkat Layanan dan Keselamatan dan Keamanan dengan agenda Pariwisata, Logistik, 3T, IKN Baru. Dukungan Kementrian Perhubungan R.I dalam Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah :

1. Program Infrastruktur Pelayanan Dasar dengan kegiatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, fokus wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus;

2. Program Infrastruktur Ekonomi dengan kegiatan Konektivitas Transportasi Darat, Laut dan Udara, fokus Kawasan Industri dan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan;
3. Program Infrastruktur Perkotaan dengan kegiatan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan, fokus 15 perkotaan di Indonesia.

Tujuan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan propinsi/kabupaten/kota.

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan tersebut dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, konektivitas dan aksesibilitas serta peningkatan layanan.

1. Keselamatan dan Keamanan, meliputi sasaran :

Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi ke dan dari kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan ekonomi khusus.

2. Konektivitas dan aksesibilitas, meliputi sasaran :

Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas ke dan dari Kawasan Industri dan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

3. Peningkatan layanan

Skor 90 pada Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Konsekuensi logis, didasari atas upaya mensinergikan antara perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya dengan perencanaan nasional dengan terbitnya Perpres No 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2019-2024 dan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2019-2024, maka dilakukan identifikasi ulang atas permasalahan pelayanan yang ada terhadap Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2019-2024.

Identifikasi atas permasalahan pelayanan yang ada dituangkan dalam telaahan terhadap permasalahan pelayanan yang ada pada perangkat daerah terhadap Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2019-2024, adalah :

Tabel 3.4
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PHB	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Aspek Keselamatan dan Keamanan			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Menurunnya angka kecelakaan transportasi 	Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas	Masih rendahnya cakupan pelaksanaan sosialisasi keselamatan	Ketersediaan sumber daya manusia
2	Aspek Konektivitas dan Aksesibilitas			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meningkatkan Konektivitas wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan; ■ Trotoar jalan masih digunakan oleh pedagang kaki lima; ■ Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas 	Masih lemahnya koordinasi antar stake holer dan pemangku kepentingan	Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan
		Pembangunan jalan baru dan terminal tipe c relative lambat	Pembebasan lahan dan ketersediaan anggaran	Ketersediaan dokumen RTRW

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PHB	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah 	Masih banyaknya ruas jalan yang digunakan diluar kepentingan lalu lintas.	Penataan parkir, pedagang kaki lima, sebaran tarikan dan bangkitan lalu lintas belum optimal	Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan
2	Aspek Pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas perlengkapan jalan masih kurang; Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal; Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai; Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik 	Keterbatasan anggaran	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RTRW
	<ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan 	Masih terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Regulasi penerimaan CPNS/PNS	Anjab pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan pegawai
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan 	Masih terbatasnya kajian terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Kebijakan dapat melibatkan jasa konsultansi
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance 	Masih rendahnya tingkat kinerja aparatur perhubungan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Anjab pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan pegawai
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan 	Masih rendahnya penetapan regulasi/kebijakan bidang perhubungan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan
	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya emisi gas rumah 	Masih adanya titik lokasi berpotensi	Terdapatnya ruas jalan	Adanya forum lalu

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PHB	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi	rawan kemacetan yang akan menyebabkan polusi udara dari emisi gas buang kendaraan	yang masih dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas	lintas dan angkutan jalan
	■ Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance	Masih rendahnya kualitas pengawasan dalam mewujudkan clean governance	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Anjab pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan pegawai

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat merupakan tujuan sasaran dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Visi “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Adapun yang diemban oleh Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat adalah misi ke-3 yaitu “Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan”.

Adapun tujuan yang untuk mencapai misi tersebut adalah Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian. Adapun indikator sasaran adalah Tingkat Konektivitas Antar Wilayah dan strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem jaringan Infrastruktur transportasi
2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern

Untuk tahun 2018-2023 arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok

2. Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial
3. Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda
4. Mengembangkan prasarana transportasi Darat,Laut, Udara dan ASDP yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis

Sasaran dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan jalan;
2. Meningkatnya Penyediaan Parasarana Perhubungan Udara;
3. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan moda perkeretaapian;
5. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

Konsekuensi logis, didasari atas upaya mensinergikan antara perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya dengan perencanaan daerah Propinsi Jawa Barat dengan terbitnya Perda No.8/2019 tentang RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, maka dilakukan identifikasi ulang atas permasalahan pelayanan yang ada terhadap Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Identifikasi atas permasalahan pelayanan yang ada dituangkan dalam telaahan terhadap permasalahan pelayanan pada perangkat daerah terhadap Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah :

Tabel 3.5
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Belum optimalnya sinergitas manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap penyediaan fasilitas perlengkapan jalan	1. Keterbatasan anggaran 2. Belum optimalnya koordinasi	1. Bantuan DAK/ Banprop 2. Adanya UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Wilayah III

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- 4) Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:
- 5) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 6) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 7) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 8) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 9) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 10) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 11) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 12) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 13) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung

terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu : periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Industri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki ranking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
 - a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
 - b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
 - c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
 - c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;

- d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
- 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
 - c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
- 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
- a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
 - g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;

- b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.
- c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis
- Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:
- a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
 - c. Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

Berikut telaahan terhadap permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah seperti pada tabel di berikut :

Tabel 3.6
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Raya			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Manajemen Persimpangan dengan Sistem ATCS 	Perlengkapan jalan masih kurang;	Keterbatasan Anggaran	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 	Manajemen penanganan pengaduan belum optimal	Keterbatasan Anggaran	Sumber Daya Manusia
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Sistem Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan (Off Street) 	Masih lemahnya Koordinasi dengan stakeholder	Keterbatasan kewenangan	Sumber Daya Manusia
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Halte/ Shelter 	Perlengkapan jalan masih kurang;	Keterbatasan Anggaran	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Jembatan Penyeberangan 	Ketersediaan ruang/lahan	Belum ada kajian lalu lintas terkait dampak yang mungkin ditimbulkan akibat pembangunan jembatan penyeberangan	Adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan
2	Pengembangan Sistem Terminal			
	a. Terminal Penumpang			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Terminal Type C (Sub Terminal) Urug - Kawalu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana angkutan belum optimal; ▪ Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan Anggaran; ▪ Kepemilikan Aset/Lahan. 	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Terminal Type C (Sub Terminal) Cipawitra - Mangkubumi 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Terminal Type C (Sub Terminal) Mugar Sari - Tamansari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana angkutan belum optimal; ▪ Jaringan trayek angkutan jalan masih 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan Anggaran; ▪ Kepemilikan Aset/Lahan. 	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.

		terdapat tumpang tindih;		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Terminal Type C (Sub Terminal) Cibeureum - Awipari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana angkutan belum optimal; ▪ Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan Anggaran 	Tersedianya DED
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Terminal Type C (Sub Terminal) Setiawargi - Tamansari 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana angkutan belum optimal; ▪ Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan Anggaran; ▪ Kepemilikan Aset/Lahan. 	Tersedianya DED
	<ul style="list-style-type: none"> • Relokasi Terminal Type C (Sub Terminal) Cikurubuk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana angkutan belum optimal; ▪ Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan Anggaran; ▪ Kepemilikan Aset/Lahan. 	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya;
	<ul style="list-style-type: none"> • Relokasi Terminal Type C (Sub Terminal) Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana angkutan belum optimal; ▪ Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan Anggaran; ▪ Kepemilikan Aset/Lahan. 	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.
	b. Pengembangan Terminal Barang			
	Pengembangan tempat pemberhentian sementara angkutan barang (TPSAB)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai; ▪ Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan Anggaran; ▪ Kepemilikan Aset/Lahan. 	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Telaahan dilakukan terhadap KLHS memuat kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup;
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
7. Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat
10. Ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu yang secara tradisional dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Analisis terhadap KLHS pada urusan perhubungan terkait Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas Nomor 2 "Perkiraan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup" yaitu terhadap analisis emisi udara, dimana menurut KLHS tersebut pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambient oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi fungsinya.

Berdasarkan data hasil pengujian kualitas udara di 10 (sepuluh) titik pemantauan KHLHS, frekuensi pengukuran sebanyak 1 (satu) periode, terdapat parameter yang melebihi ambang batas yaitu kebisingan. Sumber-sumber pencemar yang berpotensi meningkatkan parameter kebisingan antara lain :

- a. Sumber bergerak terdiri dari suara knalpot kendaraan bermotor roda 2 maupun 4
- b. Sumber tidak bergerak terdiri dari Aktifitas industri kecil maupun besar, dan aktifitas masyarakat sehari-hari (pasar, rumah tangga).

Upaya mensinergikan antara perencanaan pembangunan bidang perhubungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tasikmalaya, maka dilakukan identifikasi ulang atas permasalahan pelayanan yang ada terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Tasikmalaya, sebagai berikut :

Tabel 3.7
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Terkait Isu Strategis Sasaran
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Tasikmalaya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Perkiraan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya ruas jalan yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berdampak terhadap polusi /kualitas udara dan kebisingan di Kawasan sekitar • Masih adanya kendaraan angkutan penumpang/barang yang tidak lulus uji emisi gas buang (smoke level meter) dan tingkat kebisingan kendaraan (sound level meter) 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya ruas jalan yang dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas • Masih rendahnya kepedulian pemilik/awak angkutan umum terhadap dampak emisi gas buang dan tingkat kebisingan kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Lalu Lintas dan Angkuta Jalan; Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas • Ketersediaan gedung dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (smoke tester dan sound tester)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, isu strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, jika ditinjau dari aspek: gambaran pelayanan prangkat daerah, sasaran jangka menengah daerah, implikasi RTRW, implikasi KLHS, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi masih kurangnya perlengkapan jalan dan masih kurangnya prasarana angkutan shelter dan pembangunan serta pengembangan terminal tipe c.
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selaian untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan khususnya di pusat kota;
3. Masih adanya trayek angkutan kota yang tumpang tindih;
4. Masih kurangnya koordinasi dan sinergitas antara pemerintah propinsi dengan kabupaten/kota terkait pengawasan

pengendalian angkutan yang melintasi wilayah Kota Tasikmalaya antara lain dengan adanya program over dimensi over load (ODOL) kendaraan dari pemerintah pusat.

5. Kurang optimalnya jumlah dan pengelolaan terminal tipe c;
6. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan, diantaranya belum tersedianya data induk perlengkapan jalan.
7. Banyaknya penerangan jalan umum yang masih menggunakan jenis lampu bohlam sodium, penggantian bohlam ke jenis led relative lambat/terbatas tiap tahunnya sehingga dampak dari penurunan daya menjadi terlambat. Sehingga efisiensi pembayaran listrik ke PLN menjadi kurang optimal.
8. Masih lemahnya penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perhubungan. Hal ini terkait dengan keterbatasan anggaran untuk memenuhi pengaduan masyarakat khususnya pada pelayanan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum.
9. Manajemen penanganan informasi perhubungan masih belum optimal, hal ini terkait SOP pelaksanaan penanganan informasi perhubungan bagi masyarakat luas.
10. Adanya keterbatasan kewenangan terkait penanganan uji emisi kendaraan bermotor, hal ini hanya dilakukan terhadap kendaraan angkutan orang dan barang.

Konsekuensi logis dengan adanya perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, propinsi dan kota menjadikan adanya isu strategis di bidang perhubungan, sebagai berikut :

1. Kesenjangan yang semakin besar antara perkembangan aktivitas masyarakat Kota Tasikmalaya dengan kebutuhan perlengkapan jalan dan sarana parasarana angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan;
2. Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya adalah :

- T1 Tujuan Daerah (T4) : Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan
- S1 Sasaran Daerah (S9) : Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas
- P1 Program Daerah (P9) : Meningkatkan layanan infratraktur kota yang berkualitas
- T2 Tujuan Daerah (T5) : Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi
- S2 Sasaran Daerah (S11) : Meningkatnya kualitas layanan

publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi

P2 Program Daerah (P11) : Meningkatkan kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi

Dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran dan program daerah sebagaimana dimaksud di atas, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk empat tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2021/ 2022	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
							2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan		Indeks keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	[(Baseline Indeks fatalitas kecelakaan lalin) - (indeks fatalitas kecelakaan lalin tahun n) / Baseline indeks fatalitas kecelakaan lalin)] x 100% Keterangan : ▪ Indeks fatalitas kecelakaan lalin = Tingkat fatalitas kecelakaan lalin x (jumlah kendaraan tahun n/10.000) ▪ DO sesuai dengan Perpres No. 1 Tahun 2022 (RUNKLLAJ), ▪ tingkat fatalitas kecelakaan lalin (CFR) = jumlah meninggal / jumlah kejadian kecelakaan	%	31,86	44,50	47,75	54,72	60,88	60,88
		Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	Rata-rata persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%	66,09	67,23	68,62	70,27	72,16	72,16
2	Terwujudnya implementasi repormasi birokrasi		Indeks reformasi birokrasi								
		Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis	Capaian IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey IKM	Nilai (Kategori)	78,004 (B)	79,00 (B)	80,00 (B)	81,00 (B)	82,00 (B)	82,00 (B)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2021/ 2022	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
							2023	2024	2025	2026	
		teknologi informasi									
		Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai (Kategori)	82,59 (A)	82,60 (A)	82,65 (A)	82,68 (A)	82,75 (A)	82,75 (A)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam 4 (empat) tahun kedepan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Meningkatkan kinerja manajemen dan rekayasa lalu dan manajemen angkutan;
3. Meningkatkan layanan prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel);
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perencanaan, keuangan dan aparatur.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan perlengkapan jalan dan sarana prasarana angkutan umum pada ruas jalan kota melalui pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan, manajemen rekayasa dan pembinaan keselamatan;
2. Menurunkan indeks fatalitas kecelakaan lalu lintas melalui pemenuhan kualitas perlengkapan jalan, mengoptimalkan manajemen rekayasa lalu lintas dan manajemen angkutan;
3. Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui peningkatan kualitas pelayanan;
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui peningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan disiplin aparatur.

Didasari atas upaya mensinergikan antara perencanaan pembangunan bidang perhubungan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka dilakukan identifikasi ulang atas untuk mengetahui keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program daerah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) terhadap tujuan. sasaran dan program perangkat daerah, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Identifikasi Keterkaitan Tujuan dan Sasaran
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Terhadap Tujuan, Sasaran dan Program Daerah

No	Tujuan, Sasaran dan Program Daerah	No	Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah
T4	Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	T1	Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan
S9	Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	S1	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan
P9	Program Peningkatan layanan infratraktur kota yang berkualitas	P1	Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
T5	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	T2	Terwujudnya implementasi repormasi birokrasi
S11	Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi	S2.1	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi
		S2.2	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah (S2.2)
P11	Program Peningkatan kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi	P2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan, sasaran dan program Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya untuk mendukung program daerah Nomor 9 : “Peningkatkan layanan infratraktur kota yang berkualitas” pada tujuan nomor 4 “Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan “ dan sasaran nomor 9 “Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas “. Serta untuk mendukung program daerah Nomor 11 “Peningkatan kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi”, pada tujuan nomor 5 “Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi“ dan sasaran nomor 11

“Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi”

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam mendukung tujuan, sasaran dan program daerah adalah :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Tujuan Daerah (T4)	Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan		
Sasaran Daerah (S9)	Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas		
Program Daerah (P9)	Peningkatan layanan infratraktur kota yang berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Meningkatkan jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatkan perlengkapan jalan dan sarana prasarana angkutan umum pada ruas jalan kota melalui pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan, manajemen rekayasa dan pembinaan keselamatan
Tujuan Daerah (T5)	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi		
Sasaran Daerah (S11)	Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi		
Program Daerah (P11)	Peningkatan kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya implementasi repormasi birokrasi	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan layanan publik yang profesional, Inovatif, dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; 2. Percepatan penyerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan infirmasi dan komunikasi publik.
	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah”	Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan melalui	1. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional,

		pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja	efektive, transparan dan akuntable. 2. Peningkatan pelaksanaan pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntable serta mengacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.
--	--	--	--

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam penjabaran renstranya berpedoman pada program dan kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program yang akan dilaksanakan berjumlah 2 (dua) program yaitu program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan program urusan perhubungan non pelayanan dasar, dengan jumlah 9 kegiatan dan 35 Sub kegiatan dan program penunjang pemerintahan daerah, dengan jumlah 9 kegiatan dan 54 sub kegiatan

Dalam upaya mensinergikan pencapaian tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, dilakukan identifikasi indikator terhadap tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sebagai berikut :

Tabel 6.1
Identifikasi Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Terhadap Tujuan, Sasaran dan Program Daerah

No	Program Daerah		Renstra		
	Tujuan/Sasaran/ Program Daerah	Indikator	Tujuan/Sasaran/ Program Renstra	Indikator	Definisi Operasional
1.	Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan (T4)	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kemantapan Jalan • Indeks Kawasan Permukiman Layak Huni • Cakupan SPM PUPR • Cakupan SPM Perumahan Permukiman • IKLH • Persentase Pengelolaan Persampahan • Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 	Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan (T1)	Indeks keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	<p>[(Baseline Indeks fatalitas kecelakaan lalin) - (indeks fatalitas kecelakaan lalin tahun n) / Baseline indeks fatalitas kecelakaan lalin)] x 100%</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indeks fatalitas kecelakaan lalin = Tingkat fatalitas kecelakaan lalin x (jumlah kendaraan tahun n/10.000) ▪ DO sesuai dengan Perpres No. 1 Tahun 2022 (RUNKLLAJ), tingkat fatalitas kecelakaan lalin (CFR) = jumlah meninggal / jumlah kejadian kecelakaan
2.	Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang		Meningkatnya pelayanan lalu lintas	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	Rata-rata persentase layanan lalu lintas

	berkualitas (S9)		dan angkutan jalan yang berkeselamatan (S1)		dan angkutan berkeselamatan
3.	Program Peningkatan layanan infrastruktur kota yang berkualitas (P9)		Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (P1)	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	Jumlah realisasi ruas jalan berkeselamatan sampai dengan tahun N/ jumlah ruas jalan kota
				Persentase layanan angkutan berkeselamatan	Jumlah realisasi angkutan lulus uji/Jumlah angkutan wajib uji
4.	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi (T5)		Terwujudnya implementasi repormasi birokrasi (T2)	Indeks reformasi birokrasi	Nilai Evaluasi PMPRB
5.	Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi (S11)		Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi (S2.1)	Capaian IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey IKM
			Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah (S2.2)	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP
6.	Program Peningkatan kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi (P11)		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (P2)	Capaian IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey IKM

				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP
--	--	--	--	--------------------------------	----------------------

Tabel 6.2
Identifikasi Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Tujuan dan Sasaran
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Tujuan		Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) /Kegiatan (outcome) / Sub Kegiatan (output)
1.	Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan untuk mendukung indeks kemantapan jalan		Indeks keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan				
		Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan				
					Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan cerdas dan berkeselamatan	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan
				1.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksana dan ditetapkannya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota tersusun
					1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
					2. Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di	Terlaksananya penyediaan	Jumlah prasarana jalan di jalan

						Jalan Kabupaten/Kota	perengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	kabupaten/kota yang terbangun dan terpelihara
						1. Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun
						2. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia
						3. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
						4. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara
						3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir diterbitkan
						1. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
						2. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
						4. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota terlaksana
						1. Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
						2. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
						3. Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan	Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan

							Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
						4.	Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
						5.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
						5.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota	Jumlah analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota dihasilkan
						1.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan
						2.	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Meningkatnya Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya
						3.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
						4.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi
							Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan cerdas dan berkeselamatan	Persentase layanan angkutan berkeselamatan
						6.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C	Jumlah terminal tipe C terkelola
						1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun
						2.	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun
						3.	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan
						4.	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara
						5.	Peningkatan Kapasitas Sdm	Meningkatnya Kapasitas SDM	Jumlah SDM Pengelola Terminal

							Pengelola Terminal Tipe C	Pengelola Terminal Tipe C	Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya
						7.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor	Jumlah laporan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
						1.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia
						2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya
						3.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						4.	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						5.	Identifikasi Dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
						6.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara
						7.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						8.	Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
						8.	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota tersedia
						1.	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
						2.	Pengendalian Dan Pengawasan	Terkendalinya dan Terawasinya	Jumlah Laporan Pengendalian dan

							Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
					9.		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota ditetapkan
						1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						2.	Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
						3.	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.	Terwujudnya implementasi repormasi birokrasi						Indeks reformasi birokrasi		
							Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi		Tercapainya IKM Perangkat Daerah
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai IKM
						1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah
						1.	Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi

							Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
						2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
						3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
						4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
						5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
						6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
						7.	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
						8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
						9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
						11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
						2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
						2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
						3.	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
						4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedianya Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin

							Lainnya	Lainnya	Lainnya yang Disediakan
						5.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
						6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
						7.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
						3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
						1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
						3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
						4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
						4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
						2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
						3.	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
						4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
						5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

							Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi
						6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
						7.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah				
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
						5.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
						3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
						4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

								Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
						5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
						6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						6.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah
						1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
						2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
						4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						5.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
						6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
						7.	Penyusunan Pelaporan dan	Tersedianya Dokumen Pelaporan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan

							Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
						7.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
						2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
						3.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
						4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
						8.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
						1.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
						2.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
						9.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah
						1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
						2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
						3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
						4.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
						5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		Terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan cerdas dan berkeselamatan
1.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksana dan ditetapkannya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
	2. Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota
	1. Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
	2. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	3. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
	4. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
	1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
	2. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
4.	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
	1. Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	2. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
	3. Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota	Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	4. Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
	5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
5.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota
	1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Andalalin

	2.	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Meningkatnya Kapasitas Penilai Andalalin
	3.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
	4.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan			Terlaksananya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan cerdas dan berkeselamatan
6.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C
	1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
	2.	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya Gedung Terminal
	3.	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal
	4.	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
	5.	Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Terminal Tipe C	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
7.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor
	1.	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	3.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	4.	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	5.	Identifikasi Dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
	6.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	7.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	8.	Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
8.	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan / atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota
	1.	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.	Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
9.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
	1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.	Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	3.	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksananya program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	7. Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material
	8. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu
	9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3. Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel
	4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
	5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3. Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel
	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan	Terlaksananya perencanaan, penganggaran,

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dan evaluasi kinerja perangkat daerah
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
7.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
1.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
2.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Program Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tersebut diatas merupakan program prioritas daerah / Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Selanjutnya pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas dimaksud didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan sebagai penjabaran dari rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu pendanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Adapun kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pendanaan indikatif untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2023– 2026, adalah seperti pada tabel 6.4 sebagai berikut :

BAB VII

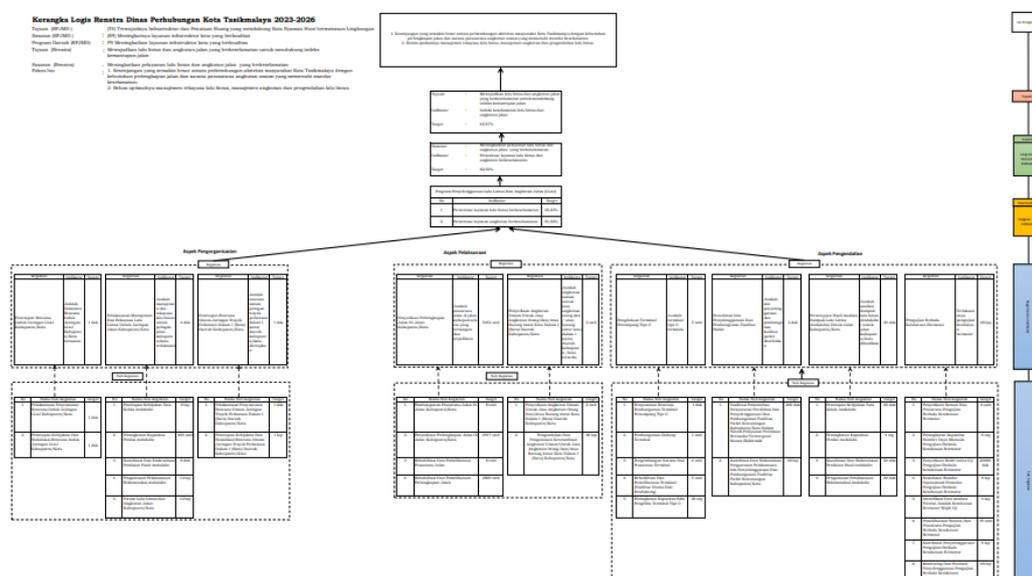
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Secara umum kinerja (performance) didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaannya. Robbins (2001) menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerjaan dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan.

Kinerja penyelenggaraan perhubungan terbagi kedalam dua bidang yaitu 1) bidang lalu lintas sebagai penanggungjawab pelaksanaan pencapaian target penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan indikator “Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan” dan 2) bidang angkutan sebagai penanggungjawab pelaksanaan pencapaian target penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan indikator “Persentase layanan angkutan berkeselamatan”.

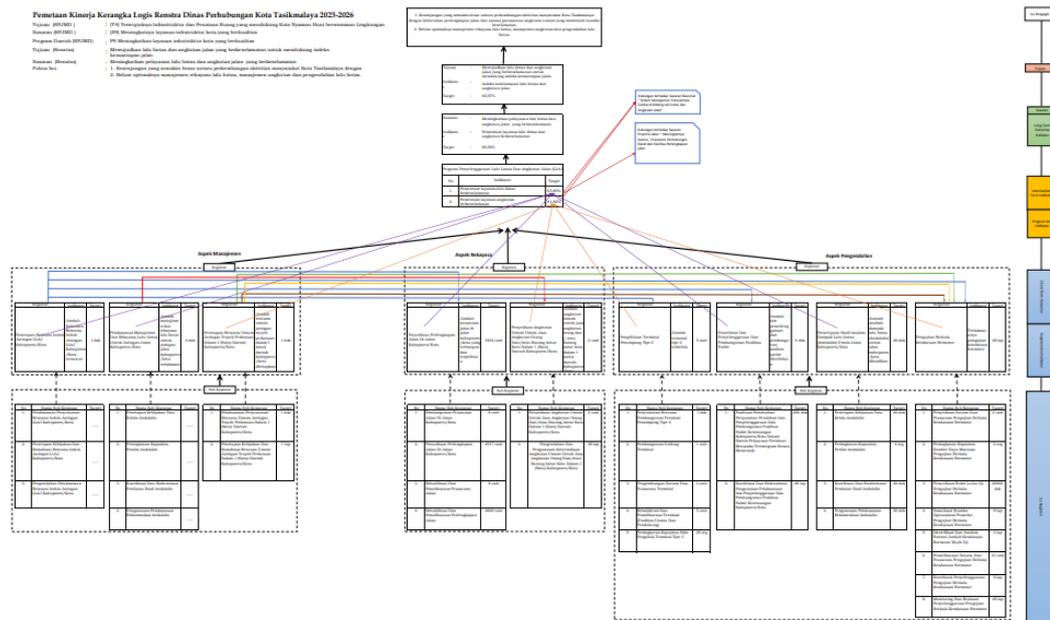
Berikut dikemukakan kerangka logis dan peta kerangka logis pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya selama 4 (empat) tahun yang memuat indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah adalah sebagai berikut :

7.1 Kerangka Logis Pencapaian Tujuan dan Sasaran Urusan Perhubungan



Gambar 5 : Kerangka Logis Renstra Pencapaian Sasaran “Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan”

7.2 Pemetaan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Urusan Perhubungan



Gambar 6 : Pemetaan Kerangka Logis Renstra Pencapaian Sasaran “Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan”

Indikator kinerja sasaran urusan perhubungan, yaitu :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sasaran Urusan Perhubungan
Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan
1.	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Indeks layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	Rata-rata persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%

Indikator kinerja sasaran penunjang urusan pemerintahan, yaitu :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Sasaran Penunjang Urusan Pemerintahan
Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Satuan
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi	Capaian IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey IKM	Nilai/ Kategori

	informasi			
2.	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai/ Kategori

Tabel 7.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

No	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2021/2022	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
						2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	Rata-rata persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%	60,09	67,23	68,62	70,27	72,16	72,16
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi	Capaian IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey IKM	Nilai (Kategori)	78,00	79,00 (B)	79,50 (B)	80,00 (B)	80,50 (B)	80,50 (B)
3.	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai (Kategori)	82,59 (A)	82,60 (A)	82,65 (A)	82,68 (A)	82,75 (A)	82,75 (A)

Tabel 7.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang
Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Pelaksana	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Definisi Operasional	Tahun	Target	Perhitungan
Kepala Dinas	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan	%	Rata-rata persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	2023	67,23	$(57,14\%+77,32\%)/2$
				2024	68,62	$(58,93\%+78,32\%)/2$
				2025	70,27	$(60,71\%+79,82\%)/2$
				2026	72,16	$(62,50\%+81,82\%)/2$
Sekretaris	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	Nilai Hasil Survey IKM	2023	79,00 (B)	Nilai Hasil Survey IKM
				2024	79,50 (B)	Nilai Hasil Survey IKM
				2025	80,00 (B)	Nilai Hasil Survey IKM
				2026	80,50 (B)	Nilai Hasil Survey IKM
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai (Kategori)	Nilai Sakip	2023	82,60 (A)	Nilai Evaluasi SAKIP
				2024	82,65 (A)	Nilai Evaluasi SAKIP
				2025	82,68 (A)	Nilai Evaluasi SAKIP

Pelaksana	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Definisi Operasional	Tahun	Target	Perhitungan
				2026	82,75 (A)	Nilai Evaluasi SAKIP
Kepala Bidang Lalu Lintas	Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	%	Jumlah realisasi ruas jalan berkeselamatan sampai dengan tahun N/ jumlah ruas jalan kota	2023	57,14	320/560
				2024	58,93	330/560
				2025	60,71	340/560
				2026	62,50	350/560
Kepala Bidang Angkutan	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	%	Jumlah realisasi angkutan lulus uji/Jumlah angkutan wajib uji	2023	77,32	15.464/20.000
				2024	78,32	15.664/20.000
				2025	79,82	15.964/20.000
				2026	81,82	16.364/20.000

BAB VIII

PENUTUP

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya wajib berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya kembali sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.